



PEMERINTAH  
KOTA PARIAMAN



# RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024

2  
0  
2  
3

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kota Pariaman dapat menyusun dan menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2022 ini adalah untuk memenuhi maksud pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Pariaman sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini berisikan uraian capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta inovasi daerah.

Kesuksesan yang telah tercapai selama rentang waktu tersebut tidak terlepas dari motivasi dan kerja keras dari semua *stakeholder* baik legislatif, eksekutif maupun masyarakat yang terlibat langsung dan berpartisipasi aktif di segala lini demi terselenggaranya tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Diharapkan laporan ini bermanfaat bagi perbaikan kinerja pemerintahan pada tahun berikutnya serta dapat menjadi bahan Pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada daerah umumnya dan Kota Pariaman khususnya serta dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan menuju arah yang lebih baik sesuai dengan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Akhirnya, kami menyadari bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami membuka diri untuk menerima masukan dan saran atas isi laporan ini, dan akan menjadi bahan untuk kesempurnaan pembuatan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya, terima kasih.

Pariaman, 27 Maret 2024

**Pj. WALI KOTA PARIAMAN**



**ROBERIA**



## DAFTAR ISI

|                                                                                  | Halaman    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kata Pengantar.....</b>                                                       | <b>i</b>   |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                                           | <b>ii</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                                                   | <b>1</b>   |
| A. Dasar Hukum.....                                                              | 1          |
| B. Gambaran Umum Daerah .....                                                    | 1          |
| C. Kondisi Geografis.....                                                        | 1          |
| D. Gambaran Umum Demografis.....                                                 | 4          |
| E. Indikator Kinerja Makro.....                                                  | 5          |
| <b>BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR.....</b>              | <b>10</b>  |
| A. Pendidikan .....                                                              | 11         |
| B. Kesehatan.....                                                                | 27         |
| C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....                                        | 49         |
| D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....                                   | 53         |
| E. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.....            | 58         |
| F. Sosial .....                                                                  | 61         |
| <b>BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....</b> | <b>85</b>  |
| A. Hasil EPPD .....                                                              | 85         |
| B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....                           | 85         |
| <b>BAB IV REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH.....</b>          | <b>87</b>  |
| A. Penerimaan Daerah .....                                                       | 87         |
| B. Pengeluaran Daerah .....                                                      | 89         |
| <b>BAB V INOVASI DAERAH .....</b>                                                | <b>93</b>  |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                                      | <b>103</b> |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH**

Kota Pariaman dulunya merupakan Kota Administratif, dan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Oktober 1987.

Dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat, maka status Kota Administratif Pariaman berubah menjadi Kota Pariaman yang secara kelembagaan telah berdiri sejajar dengan daerah kota lainnya di Indonesia.

### **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Kota Pariaman adalah satu dari 19 kab/kota di Sumatera Barat, daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman merupakan hamparan dataran rendah dengan luas 64,97 Km<sup>2</sup>, berhawa panas dan memiliki panjang garis pantai 12,7 Km. Disamping daratan terdapat 4 (empat) pulau kecil non urban yakni Pulau Angso Duo, Pulau Kasiak, Pulau Tengah, dan Pulau Ujuang.

Kota Pariaman terletak antara 00° 33' 00" - 00° 40' 43" Lintang Selatan dan 100° 04' 46" - 100° 10' 55" Bujur Timur. Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yakni Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Kota Pariaman juga identik dengan Kota Pantai dimana seluruh Kecamatan di Kota Pariaman memiliki wilayah yang berbatasan dengan pantai kecuali Kecamatan Pariaman Timur. Rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-15 meter dari permukaan laut.

Disamping memiliki pantai yang indah, Kota Pariaman juga dilewati oleh 3 (tiga) sungai yaitu Batang Pariaman sepanjang 12 Km, Batang Manggung sepanjang 11,50 Km dan Batang Manggau sepanjang 11,80 Km.

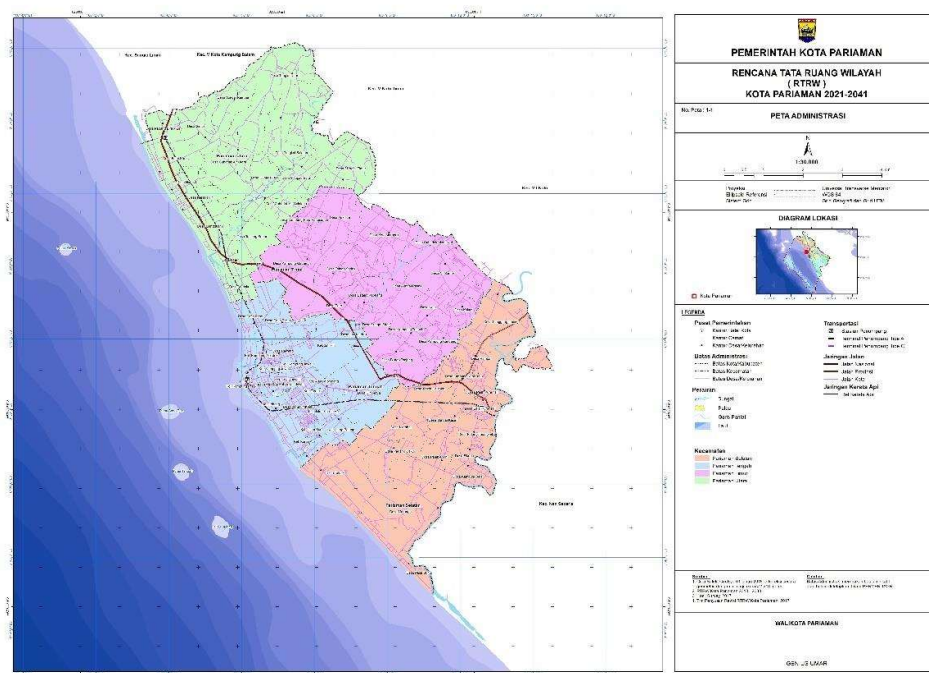
### **C. KONDISI GEOGRAFIS**

#### **1. Batas Administrasi Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomo 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni : Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Padang Pariaman)
- c. Sebelah Timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Padang Pariaman)
- d. Sebelah Barat : Samudra Indonesia



### Peta Administrasi Kota Pariaman

## 2. Luas Wilayah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah sebesar 73,36 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 282,69 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 12,7 Km<sup>2</sup> yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 -2042 pada tanggal 16 September 2022, Luas Wilayah Kota Pariaman yaitu 64,97 km.

### 3. Topografis

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Memiliki 4 (empat) pulau kecil non urban yakni Pulau Angso Duo, Pulau Kasiak, Pulau Tangah, dan Pulau Ujuang dengan panjang garis pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Karena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35



meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Luas kemiringan lahan dapat dirinci pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Topografi Kota Pariaman**

| Kondisi Topografi   | Luas (ha) | Persentase (%) |
|---------------------|-----------|----------------|
| Datar (0-3%)        | 6.207     | 95,53%         |
| Agak Landai (3-8%)  | 23        | 0.35%          |
| Landai (8-15%)      | 48        | 0,74%          |
| Agak Curam (15-25%) | 25        | 0,39%          |
| Curam (25- 40%)     | 194       | 2.99%          |
| Jumlah              | 6.493     | 100,0%         |

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042

#### 4. Geologi

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tufa vulkan. Batuan induk penyusun adalah Aluvium serta Tuf Batu Apung dan Andesit (basal). Kota Pariaman secara geologis bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo – Australia dan topografi Padang Pariaman yang dilalui oleh banyak anak-anak sungai. Adapun jenis batuan yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1) Qal : Endapan Aluvial

Batuan Qal/endapan permukaan merupakan formasi geologi aluvium yang terdiri dari lanau, dan kerikil umumnya terdapat di daratan pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara tikau, sebelah Barat Daya Lubuk Alung dan sebelah Timur Padang.

2) Qpt : TUFT Batu apung dan andesit (basal).

Tuf batuapung umumnya terdiri dari serabut-serabut gelas dari 5 hingga 80% fragmen-fragmen batuapung putih (hampir tidak memiliki mineral-mineral mafik). Berukuran garis tengah 1 hingga 20 cm, agak kompak. Setempat terdapat lapisan-lapisan pasir yang kaya akan kuarsa, juga lapisan-lapisan kerikil yang terdiri dari komponen-komponen kuarsa, batuan gunung api dan batuan gamping. Setempat bongkahan-bongkahan obsidian dan pichstone berwarna kelabu kemerahan sampai kecoklatan baik yang masih segar maupun yang sudah lapuk. Endapan tuft ini mungkin berasal dari erupsi terakhir Kaldera Maninjau atau erupsi celah yang hubungannya dengan jalur sesar besar Sumatera (Westerveld, 1953). Hubungan di lapangan menunjukkan bahwa Qhpt terletak di atas Qpt.

Secara fisik butiran penyusun tanah/batuan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu lima satuan: satuan pasir, satuan pasir lempung-lanauan, satuan pasir lempungan, satuan lempungan pasir dan satuan lanau lempungan. Satuan butiran tanah pasir terdapat di kawasan pesisir. Satuan pasir lempungan



terdapat pada dataran sementara satuan lanau lempungan terdapat pada daerah kearah timur. Satuan lempung pasir terdapat di bagian utara di daerah Tungkal Utara dan Tungkal Selatan.

## 5. Klimatologi (Iklim)

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34°C, dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.

Musim kemarau dan musim hujan selalu berubah-ubah menurut waktu. Iklim yang demikian memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman, akan tetapi curah hujan dan tingkat kelembaban yang tinggi yang menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya tanaman yang membutuhkan iklim musim kemarau tidak dapat tumbuh dengan baik, merupakan kendala bagi penanganan pasca panen komoditas tertentu yang memerlukan cuaca panas dan cerah selama proses pengeringan, kendala dalam penyimpanan komoditas, berkurangnya jumlah hari kerja produktif dan pengaruhnya negatif terhadap sejumlah komoditas. Iklim juga sangat mempengaruhi besarnya tangkapan ikan bagi nelayan.

## D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2023 sebanyak 101.680 jiwa, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dengan jumlah penduduknya sebanyak 98.690 jiwa. Dengan komposisi penduduk untuk tahun 2023 sebanyak 51.267 jiwa penduduk laki-laki dan 50.413 jiwa penduduk perempuan.

### 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

**Tabel 1.2.**  
**Penduduk Kota Pariaman menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin**

| Golongan Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 0 – 4         | 4.082     | 3.767     | 7.849  |
| 5 – 9         | 4.575     | 4.127     | 8.702  |
| 10 – 14       | 4.728     | 4.465     | 9.193  |
| 15 – 19       | 4.501     | 4.110     | 8.611  |
| 20 – 24       | 4.720     | 4.465     | 9.185  |
| 25 – 29       | 4.552     | 4.153     | 8.705  |
| 30 – 34       | 3.728     | 3.427     | 7.155  |
| 35 – 39       | 3.798     | 3.577     | 7.375  |
| 40 – 44       | 3.614     | 3.367     | 6.981  |
| 45 – 49       | 3.189     | 3.020     | 6.209  |
| 50 – 54       | 2.612     | 2.747     | 5.359  |
| 55 – 59       | 2.400     | 2.551     | 4.951  |



|               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 60 – 64       | 1.813         | 2.104         | 3.917          |
| 65 – 69       | 1.347         | 1.753         | 3.100          |
| 70 – 74       | 823           | 1.143         | 1.966          |
| >=75          | 785           | 1.637         | 2.422          |
| <b>Jumlah</b> | <b>51.267</b> | <b>50.413</b> | <b>101.680</b> |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

## E. INDIKATOR KINERJA MAKRO

### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka indeks pembangunan manusia Kota Pariaman pada tahun 2023 sebesar 79,76 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang besarnya 79,31. Pada level Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, angka IPM Kota Pariaman kembali menduduki urutan ke-empat.

### b. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan. Jumlah penduduk miskin di Kota Pariaman tahun 2023 sebanyak 3.910 orang dengan persentase sebesar 4,20%. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 sebanyak 3.796 dengan persentase 4,13%.

### c. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,68%, ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,19%.

### d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2023 tercatat sebesar 4,79 persen berada pada urutan ke empat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya se Sumatera Barat. Angka ini diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari 3.835.249,8 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 4.018.868,3 juta rupiah pada tahun 2023. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2023 tercatat 6.435.119,8 juta rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun yang lalu dimana pada tahun 2022 yaitu sebesar 5.881.852,9 juta rupiah.

Struktur perekonomian Kota Pariaman tahun 2023 menunjukkan 4 kategori lapangan usaha yang kontribusinya diatas 10 persen dalam pembentukan nilai tambah bruto. Secara berurutan masing-masing yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,67 persen, kedua kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,21 persen, dan yang



ketiga kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,47 persen, dan yang keempat dari sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,52 persen.

#### **e. PDRB Per Kapita**

PDRB Perkapita merupakan nilai nominal PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Artinya, nilai PDRB perkapita sangat tergantung pada besaran nilai PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang bersangkutan. PDRB Perkapita merupakan pendekatan yang menunjukkan rata-rata pendapatan yang mungkin dinikmati oleh setiap penduduk suatu daerah selama satu tahun. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah maka akan menunjukkan semakin baiknya tingkat perekonomian daerah tersebut, meskipun ukuran ini tidak sepenuhnya dapat menggambarkan pendapatan antar penduduk secara riil dan merata. Penyebabnya keterbatasan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku ini untuk mendeteksi kondisi riil perekonomian masyarakat disebabkan beberapa hal diantaranya PDRB perkapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan penguasaan aset dan penerimaan balas jasa faktor produksi. Selanjutnya, PDRB Perkapita masih mengandung pengaruh tingkat kenaikan harga atau inflasi sehingga belum benar-benar menggambarkan daya beli masyarakat. Namun demikian, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro. Pada tahun 2023 Pendapatan Perkapita Kota Pariaman sebesar 66,20 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 besarnya 61,23 persen.

#### **f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)**

Gini Ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita). Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika  $G < 0,3$  berarti memiliki ketimpangan yang rendah,  $0,3 < G < 0,5$  berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika  $G > 0,5$  berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Pada tahun 2023 nilai gini rasio Kota Pariaman tercatat 0,289. Ini berarti Gini Ratio Kota Pariaman masih tergolong kategori Ketimpangan Rendah.



## **BAB II**

### **RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam pencapaian rencana pembangunan yang berdasarkan kepada misi dan visi yang telah ditetapkan. Program harus dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan roda pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja merupakan keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.



## A. PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan diselenggarakan Oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 146.444.712.565,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 136.487.114.121,- (93,20%), dengan uraian berikut:

| No  | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                       | Target Dalam Dokumen Anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi Anggaran     | Realisasi Anggaran   | % Realisasi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|
|     | Dinas Dikpora                                                                         |                               |           | 94,72%          | Rp 145.934.604.048,- | Rp 134.534.277.028,- | 92,19%      |
| A   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota                                  |                               |           |                 | Rp 111.537.693.338,- | Rp 105.161.289.031,- | 94,28%      |
| I   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                               |           |                 | Rp 520.707.893,-     | Rp 518.914.637,-     | 99,66%      |
| 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1 dok                         | 1 dok     | 100,00%         | Rp 510.201.580,-     | Rp 509.208.324,-     | 99,81%      |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 dok                         | 3 dok     | 100,00%         | Rp 10.506.313,-      | Rp 9.706.313,-       | 92,39%      |
| II  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                               |           |                 | Rp 108.614.266.409,- | Rp 102.572.581.423,- | 94,44%      |
| 3   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 14 bulan                      | 14 bulan  | 100,00%         | Rp 108.354.266.409,- | Rp 102.316.813.423,- | 94,43%      |
| 4   | Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 100 OB                        | 100 OB    | 100,00%         | Rp 260.000.000,-     | Rp 255.768.000,-     | 98,37%      |
| III | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                               |           |                 | Rp 751.114.036,-     | Rp 646.305.178,-     | 86,05%      |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                                                                    |            |           |         |                    |                  |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|--------------------|------------------|---------|
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 6 Jenis    | 6 Jenis   | 100,00% | Rp 4.000.000,-     | Rp 3.922.000,-   | 98,05%  |
| 6  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 7 unit     | 7 unit    | 100,00% | Rp 69.000.000,-    | Rp 68.645.508,-  | 99,49%  |
| 7  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 12 bulan   | 12 bulan  | 100,00% | Rp 61.514.036,-    | Rp 59.032.147,-  | 95,97%  |
| 8  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 12 bulan   | 12 bulan  | 100,00% | Rp 15.000.000,-    | Rp 15.000.000,-  | 100,00% |
| 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 12 bulan   | 12 bulan  | 100,00% | Rp 601.600.000,-   | Rp 499.705.523,- | 83,06%  |
| IV | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |            |           |         | Rp 1.106.612.000,- | Rp 952.309.109,- | 86,06%  |
| 10 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 300 lembar | 75 lembar | 25,00%  | Rp 3.000.000,-     | Rp 750.000,-     | 25,00%  |
| 11 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12 bulan   | 12 bulan  | 100,00% | Rp 61.700.000,-    | Rp 57.300.709,-  | 92,87%  |
| 12 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 bulan   | 12 bulan  | 100,00% | Rp 1.041.912.000,- | Rp 894.258.400,- | 85,83%  |
| V  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                |            |           |         | Rp 544.993.000,-   | Rp 471.178.684,- | 86,46%  |
| 13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 18 unit    | 18 unit   | 100,00% | Rp 210.028.000,-   | Rp 154.418.684,- | 73,52%  |
| 14 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 32 unit    | 32 unit   | 100,00% | Rp 20.140.000,-    | Rp 19.410.000,-  | 96,38%  |
| 15 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1 gedung   | 1 gedung  | 100,00% | Rp 314.825.000,-   | Rp 297.350.000,- | 94,45%  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                                          |            |            |  |         |                     |                     |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------|
| B  | Program Pengelolaan Pendidikan                                                           |            |            |  |         | Rp 28.878.720.185,- | Rp 25.023.008.908,- | 86,65% |
| VI | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                     |            |            |  |         | Rp 17.094.182.366,- | Rp 14.689.571.840,- | 85,93% |
| 16 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       | 15 sekolah | 15 sekolah |  | 100,00% | Rp 3.227.006.691,-  | Rp 3.039.256.124,-  | 94,18% |
| 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | 1 sekolah  | 1 sekolah  |  | 100,00% | Rp 98.232.376,-     | Rp 97.357.726,-     | 99,11% |
| 18 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                  | 2 paket    | 2 paket    |  | 100,00% | Rp 149.060.000,-    | Rp 48.600.000,-     | 32,60% |
| 19 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                    | 384 siswa  | 384 siswa  |  | 100,00% | Rp 602.695.300,-    | Rp 305.280.000,-    | 50,65% |
| 20 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                  | 1 paket    | 1 paket    |  | 100,00% | Rp 412.000.000,-    | Rp 378.222.000,-    | 91,80% |
| 21 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             | 86 sekolah | 86 sekolah |  | 100,00% | Rp 444.142.000,-    | Rp 205.150.000,-    | 46,19% |
| 22 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         | 228 orang  | 228 orang  |  | 100,00% | Rp 1.921.870.000,-  | Rp 1.489.590.000,-  | 77,51% |
| 23 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1430 orang | 500 orang  |  | 34,97%  | Rp 601.220.000,-    | Rp 85.380.000,-     | 14,20% |
| 24 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | 81 sekolah | 81 sekolah |  | 100,00% | Rp 8.863.466.000,-  | Rp 8.493.140.115,-  | 95,82% |
| 25 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                   | 2 paket    | 2 paket    |  | 100,00% | Rp 774.489.999,-    | Rp 547.595.875,-    | 70,70% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|      |                                                                                                     |            |            |         |                    |                    |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------------|--------------------|---------|
| VII  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                     |            |            |         | Rp 3.813.648.819,- | Rp 3.117.859.968,- | 81,76%  |
| 26   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                            | 1 sekolah  | 1 sekolah  | 100,00% | Rp 329.854.650,-   | Rp 275.198.246,-   | 83,43%  |
| 27   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 2 sekolah  | 2 sekolah  | 100,00% | Rp 1.230.890.000,- | Rp 1.143.664.022,- | 92,91%  |
| 28   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 1 sekolah  | 1 sekolah  | 100,00% | Rp 463.516.740,-   | Rp 329.576.000,-   | 71,10%  |
| 29   | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | 2 paket    | 2 paket    | 100,00% | Rp 186.050.000,-   | Rp 185.200.000,-   | 99,54%  |
| 30   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    | 141 siswa  | 141 siswa  | 100,00% | Rp 125.039.200,-   | Rp 115.200.000,-   | 92,13%  |
| 31   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                             | 1 paket    | 1 paket    | 100,00% | Rp 125.000.000,-   | Rp 124.995.000,-   | 100,00% |
| 32   | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        | 12 sekolah | 12 sekolah | 100,00% | Rp 181.092.229,-   | Rp 75.810.000,-    | 41,86%  |
| 33   | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | 168 orang  | 168 orang  | 100,00% | Rp 668.000.000,-   | Rp 619.455.000,-   | 92,73%  |
| 34   | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 450 orang  | 150 orang  | 33,33%  | Rp 165.406.000,-   | Rp 28.170.000,-    | 17,03%  |
| 35   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | 9 sekolah  | 9 sekolah  | 100,00% | Rp 338.800.000,-   | Rp 220.591.700,-   | 65,11%  |
| VIII | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                        |            |            |         | Rp 6.881.851.000,- | Rp 6.280.872.100,- | 91,27%  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                                 |             |             |         |                    |                    |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|---------|
| 36 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                                  | 1 sekolah   | 1 sekolah   | 100,00% | Rp 198.000.000,-   | Rp 197.250.000,-   | 99,62%  |
| 37 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                 | 4 paket     | 4 paket     | 100,00% | Rp 734.992.000,-   | Rp 576.685.050,-   | 78,46%  |
| 38 | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                     | 3 sekolah   | 3 sekolah   | 100,00% | Rp 300.000.000,-   | Rp 296.195.000,-   | 98,73%  |
| 39 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                    | 50 orang    | 0           | 0,00%   | Rp 15.000.000,-    | -                  | 0,00%   |
| 40 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                         | 1 paket     | 1 paket     | 100,00% | Rp 84.000.000,-    | Rp 83.072.600,-    | 98,90%  |
| 41 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                             | 650 anak    | 650 anak    | 100,00% | Rp 200.000.000,-   | Rp 184.179.000,-   | 92,09%  |
| 42 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD                    | 380 orang   | 380 orang   | 100,00% | Rp 2.554.000.000,- | Rp 2.337.315.000,- | 91,52%  |
| 43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD | 500 orang   | 500 orang   | 100,00% | Rp 417.790.000,-   | Rp 274.449.200,-   | 65,69%  |
| 44 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        | 100 lembaga | 100 lembaga | 100,00% | Rp 423.519.000,-   | Rp 399.474.250,-   | 94,32%  |
| 45 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       | 100 lembaga | 100 lembaga | 100,00% | Rp 1.850.400.000,- | Rp 1.850.400.000,- | 100,00% |
| 46 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                 | 100 lembaga | 100 lembaga | 100,00% | Rp 104.150.000,-   | Rp 81.852.000,-    | 78,59%  |
| IX | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                     |             |             |         | Rp 1.089.038.000,- | Rp 934.705.000,-   | 85,83%  |
| 47 | Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan                            | 6 lembaga   | 6 lembaga   | 100,00% | Rp 89.600.000,-    | Rp 88.605.000,-    | 98,89%  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                                                        |            |            |         |                  |                  |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------------|------------------|---------|
| 48 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan                                      | 6 lembaga  | 0          | 0,00%   | Rp 153.338.000,- | -                | 0,00%   |
| 59 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan                                                     | 6 lembaga  | 6 lembaga  | 100,00% | Rp 846.100.000,- | Rp 846.100.000,- | 100,00% |
| C  | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                                              |            |            |         | Rp 9.936.250,-   | Rp 3.931.200,-   | 39,56%  |
| X  | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    |            |            |         | Rp 9.936.250,-   | Rp 3.931.200,-   | 39,56%  |
| 50 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 10 lembaga | 10 lembaga | 100,00% | Rp 9.936.250,-   | Rp 3.931.200,-   | 39,56%  |
| F  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan                                                  |            |            |         | Rp 300.000.000,- | Rp 300.000.000,- | 100,00% |
| XI | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                      |            |            |         | Rp 300.000.000,- | Rp 300.000.000,- | 100,00% |
| 59 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                    | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Rp 300.000.000,- | Rp 300.000.000,- | 100,00% |
|    | SKB                                                                                                    |            |            |         | Rp 218.229.000,- | Rp 209.155.013,- | 95,84%  |
| A  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota                                                   |            |            |         | Rp 84.729.000,-  | Rp 75.679.163,-  | 89,32%  |
| I  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                 |            |            |         | Rp 12.600.000,-  | Rp 7.260.000,-   | 57,62%  |
| 1  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Rp 12.600.000,-  | Rp 7.260.000,-   | 57,62%  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|     |                                                                       |           |           |         |  |                 |                 |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|-----------------|-----------------|---------|
| II  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 12 bulan  | 12 bulan  |         |  | Rp 30.329.000,- | Rp 29.829.000,- | 98,35%  |
| 2   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 11.199.000,- | Rp 11.199.000,- | 100,00% |
| 3   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 7.130.000,-  | Rp 6.880.000,-  | 96,49%  |
| 4   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 12.000.000,- | Rp 11.750.000,- | 97,92%  |
| III | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |           |           |         |  | Rp 11.600.000,- | Rp 11.588.400,- | 99,90%  |
| 5   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | 1 gedung  | 1 gedung  | 100,00% |  | Rp 11.600.000,- | Rp 11.588.400,- | 99,90%  |
| IV  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |           |           |         |  | Rp 23.400.000,- | Rp 20.551.763,- | 87,83%  |
| 6   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 20 lembar | 20 lembar | 100,00% |  | Rp 200.000,-    | Rp 200.000,-    | 100,00% |
| 7   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 8.500.000,-  | Rp 7.401.763,-  | 87,08%  |
| 8   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 14.700.000,- | Rp 12.950.000,- | 88,10%  |
| V   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |           |           |         |  | Rp 6.800.000,-  | Rp 6.450.000,-  | 94,85%  |
| 9   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 6.800.000,-  | Rp 6.450.000,-  | 94,85%  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                                          |          |          |  |  |                  |                  |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|------------------|------------------|---------|
| B  | Program Pengelolaan Pendidikan                                                           |          |          |  |  | Rp 133.500.000,- | Rp 133.475.850,- | 99,98%  |
| VI | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan                                             |          |          |  |  | Rp 133.500.000,- | Rp 133.475.850,- | 99,98%  |
| 10 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan        | 1 gedung | 1 gedung |  |  | Rp 7.500.000,-   | Rp 7.475.850,-   | 99,68%  |
| 11 | Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 12 bulan | 12 bulan |  |  | Rp 126.000.000,- | Rp 126.000.000,- | 100,00% |
|    | SMP Negeri 1 Pariaman                                                                    |          |          |  |  | Rp 523.500.000,- | Rp 512.370.000,- | 97,87%  |
| A  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota                                     |          |          |  |  | Rp 25.200.000,-  | Rp 14.070.000,-  | 55,83%  |
| I  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   |          |          |  |  | Rp 16.200.000,-  | Rp 9.660.000,-   | 59,63%  |
| 1  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | 12 bulan | 12 bulan |  |  | Rp 16.200.000,-  | Rp 9.660.000,-   | 59,63%  |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       |          |          |  |  | Rp 9.000.000,-   | Rp 4.410.000,-   | 49,00%  |
| 2  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                         | 12 bulan | 12 bulan |  |  | Rp 4.000.000,-   | Rp 3.060.000,-   | 76,50%  |
| 3  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 12 bulan | 12 bulan |  |  | Rp 5.000.000,-   | Rp 1.350.000,-   | 27,00%  |
| B  | Program Pengelolaan Pendidikan                                                           |          |          |  |  | Rp 498.300.000,- | Rp 498.300.000,- | 100,00% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|     |                                                      |          |  |  |                  |                  |         |
|-----|------------------------------------------------------|----------|--|--|------------------|------------------|---------|
| III | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama      | 12 bulan |  |  | Rp 498.300.000,- | Rp 498.300.000,- | 100,00% |
| 4   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama        | 12 bulan |  |  | Rp 498.300.000,- | Rp 498.300.000,- | 100,00% |
|     | SMP Negeri 2 Pariaman                                |          |  |  | Rp 666.470.000,- | Rp 655.403.250,- | 98,34%  |
| A   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota |          |  |  | Rp 29.570.000,-  | Rp 18.503.250,-  | 62,57%  |
| I   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               |          |  |  | Rp 16.200.000,-  | Rp 9.660.000,-   | 59,63%  |
| 1   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN        | 12 bulan |  |  | Rp 16.200.000,-  | Rp 9.660.000,-   | 59,63%  |
| II  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |          |  |  | Rp 13.370.000,-  | Rp 8.843.250,-   | 66,14%  |
| 2   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | 12 bulan |  |  | Rp 7.195.000,-   | Rp 6.211.000,-   | 86,32%  |
| 3   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | 12 bulan |  |  | Rp 1.250.000,-   | Rp 1.082.250,-   | 86,58%  |
| 4   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan |  |  | Rp 4.925.000,-   | Rp 1.550.000,-   | 31,47%  |
| B   | Program Pengelolaan Pendidikan                       |          |  |  | Rp 636.900.000,- | Rp 636.900.000,- | 100,00% |
| III | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama      |          |  |  | Rp 636.900.000,- | Rp 636.900.000,- | 100,00% |
| 5   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama        | 12 bulan |  |  | Rp 636.900.000,- | Rp 636.900.000,- | 100,00% |
|     | SMP Negeri 3 Pariaman                                |          |  |  | Rp 757.200.000,- | Rp 738.894.764,- | 97,58%  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|     |                                                      |          |          |         |  |                  |                  |         |
|-----|------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--|------------------|------------------|---------|
| A   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota |          |          |         |  | Rp 42.200.000,-  | Rp 23.895.000,-  | 56,62%  |
| I   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               |          |          |         |  | Rp 16.200.000,-  | Rp 11.270.000,-  | 69,57%  |
| 1   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN        | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |  | Rp 16.200.000,-  | Rp 11.270.000,-  | 69,57%  |
| II  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |          |          |         |  | Rp 26.000.000,-  | Rp 12.625.000,-  | 48,56%  |
| 2   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |  | Rp 6.000.000,-   | Rp 5.000.000,-   | 83,33%  |
| 3   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |  | Rp 20.000.000,-  | Rp 7.625.000,-   | 38,13%  |
| B   | Program Pengelolaan Pendidikan                       |          |          |         |  | Rp 715.000.000,- | Rp 714.999.764,- | 100,00% |
| III | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama      |          |          |         |  | Rp 715.000.000,- | Rp 714.999.764,- | 100,00% |
| 4   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama        | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |  | Rp 715.000.000,- | Rp 714.999.764,- | 100,00% |
|     | SMP Negeri 4 Pariaman                                |          |          |         |  | Rp 454.600.000,- | Rp 440.540.000,- | 96,91%  |
| A   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota |          |          |         |  | Rp 25.600.000,-  | Rp 11.540.000,-  | 45,08%  |
| I   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               |          |          |         |  | Rp 16.200.000,-  | Rp 9.660.000,-   | 59,63%  |
| 1   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN        | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |  | Rp 16.200.000,-  | Rp 9.660.000,-   | 59,63%  |
| II  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |          |          |         |  | Rp 9.400.000,-   | Rp 1.880.000,-   | 20,00%  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|     |                                                      |          |          |         |                  |                  |         |
|-----|------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------------------|------------------|---------|
| 2   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 4.400.000,-   | Rp 1.880.000,-   | 42,73%  |
| 3   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 0,00%   | Rp 5.000.000,-   | -                | 0,00%   |
| B   | Program Pengelolaan Pendidikan                       |          |          |         | Rp 429.000.000,- | Rp 429.000.000,- | 100,00% |
| III | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama      |          |          |         | Rp 429.000.000,- | Rp 429.000.000,- | 100,00% |
| 4   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama        | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 429.000.000,- | Rp 429.000.000,- | 100,00% |
|     | SMP Negeri 5 PARIAMAN                                |          |          |         | Rp 385.574.500,- | Rp 350.013.500,- | 90,78%  |
| A   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota |          |          |         | Rp 63.274.500,-  | Rp 27.713.500,-  | 43,80%  |
| I   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               |          |          |         | Rp 16.800.000,-  | Rp 8.460.000,-   | 50,36%  |
| 1   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN        | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 16.800.000,-  | Rp 8.460.000,-   | 50,36%  |
| II  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |          |          |         | Rp 44.084.500,-  | Rp 16.863.500,-  | 38,25%  |
| 2   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 25.584.500,-  | Rp 14.863.500,-  | 58,10%  |
| 3   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan              | 12 bulan | 12 bulan | 0,00%   | Rp 3.500.000,-   | -                | 0,00%   |
| 4   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 15.000.000,-  | Rp 2.000.000,-   | 13,33%  |
| III | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |          |          |         | Rp 200.000,-     | Rp 200.000,-     | 100,00% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                       |           |           |         |                  |                  |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|
| 5  | Penyediaan jasa Surat Menyurat                                        | 20 lembar | 20 lembar | 100,00% | Rp 200.000,-     | Rp 200.000,-     | 100,00% |
| IV | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah |           |           |         | Rp 2.190.000,-   | Rp 2.190.000,-   | 100,00% |
| 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Rp 2.190.000,-   | Rp 2.190.000,-   | 100,00% |
| B  | Program Pengelolaan Pendidikan                                        |           |           |         | Rp 322.300.000,- | Rp 322.300.000,- | 100,00% |
| V  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                       |           |           |         | Rp 322.300.000,- | Rp 322.300.000,- | 100,00% |
| 7  | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                         | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Rp 322.300.000,- | Rp 322.300.000,- | 100,00% |
|    | SMP Negeri 6 Pariaman                                                 |           |           |         | Rp 404.092.400,- | Rp 381.850.250,- | 94,50%  |
| A  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota                  |           |           |         | Rp 33.392.400,-  | Rp 11.150.250,-  | 33,39%  |
| I  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |           |           |         | Rp 16.200.000,-  | Rp 9.165.000,-   | 56,57%  |
| 1  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Rp 16.200.000,-  | Rp 9.165.000,-   | 56,57%  |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |           |           |         | Rp 15.698.400,-  | Rp 1.985.250,-   | 12,65%  |
| 2  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Rp 8.699.400,-   | Rp 1.985.250,-   | 22,82%  |
| 3  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 0,00%   | Rp 1.999.000,-   | -                | 0,00%   |
| 4  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 12 bulan  | 12 bulan  | 0,00%   | Rp 5.000.000,-   | -                | 0,00%   |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|     |                                                                  |          |          |         |                  |                  |         |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------------------|------------------|---------|
| III | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |          |          |         | Rp 1.494.000,-   | -                | 0,00%   |
| 5   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 12 bulan | 12 bulan | 0,00%   | Rp 1.494.000,-   | -                | 0,00%   |
| B   | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |          |          |         | Rp 370.700.000,- | Rp 370.700.000,- | 100,00% |
| IV  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |          |          |         | Rp 370.700.000,- | Rp 370.700.000,- | 100,00% |
| 6   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 370.700.000,- | Rp 370.700.000,- | 100,00% |
|     | SMP Negeri 7 Pariaman                                            |          |          |         | Rp 636.175.000,- | Rp 614.430.900,- | 96,58%  |
| A   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota             |          |          |         | Rp 61.975.000,-  | Rp 40.230.900,-  | 64,91%  |
| I   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |          |          |         | Rp 19.800.000,-  | Rp 10.365.000,-  | 52,35%  |
| 1   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 19.800.000,-  | Rp 10.365.000,-  | 52,35%  |
| II  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |          |          |         | Rp 26.775.000,-  | Rp 17.400.000,-  | 64,99%  |
| 2   | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 1.500.000,-   | Rp 900.000,-     | 60,00%  |
| 3   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 12 bulan | 12 bulan | 0,00%   | Rp 4.000.000,-   | -                | 0,00%   |
| 4   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 12 bulan | 12 bulan | 0,00%   | Rp 2.000.000,-   | -                | 0,00%   |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|     |                                                                       |           |           |         |                  |                  |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|
| 5   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Rp 11.275.000,-  | Rp 11.275.000,-  | 100,00% |
| 6   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Rp 4.000.000,-   | Rp 4.000.000,-   | 100,00% |
| 7   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Rp 4.000.000,-   | Rp 1.225.000,-   | 30,63%  |
| III | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |           |           |         | Rp 13.400.000,-  | Rp 12.465.900,-  | 93,03%  |
| 8   | Penyediaan jasa Surat Menyurat                                        | 20 lembar | 20 lembar | 0,00%   | Rp 200.000,-     | -                | 0,00%   |
| 9   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Rp 13.200.000,-  | Rp 12.465.900,-  | 94,44%  |
| IV  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah |           |           |         | Rp 2.000.000,-   | -                | 0,00%   |
| 10  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 12 bulan  | 12 bulan  | 0,00%   | Rp 2.000.000,-   | -                | 0,00%   |
| B   | Program Pengelolaan Pendidikan                                        |           |           |         | Rp 574.200.000,- | Rp 574.200.000,- | 100,00% |
| V   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                       |           |           |         | Rp 574.200.000,- | Rp 574.200.000,- | 100,00% |
| 11  | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                         | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Rp 574.200.000,- | Rp 574.200.000,- | 100,00% |
|     | SMP Negeri 8 Pariaman                                                 |           |           |         | Rp 273.157.892,- | Rp 258.544.751,- | 94,65%  |
| A   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota                  |           |           |         | Rp 53.157.892,-  | Rp 38.544.751,-  | 72,51%  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|     |                                                                       |           |           |         |  |                  |                  |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|------------------|------------------|---------|
| I   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |           |           |         |  | Rp 8.460.000,-   | Rp 7.050.000,-   | 83,33%  |
| 1   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 8.460.000,-   | Rp 7.050.000,-   | 83,33%  |
| II  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |           |           |         |  | Rp 17.997.892,-  | Rp 11.184.250,-  | 62,14%  |
| 2   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 11.772.892,-  | Rp 7.691.500,-   | 65,33%  |
| 3   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 3.475.000,-   | Rp 2.392.750,-   | 68,86%  |
| 4   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 2.750.000,-   | Rp 1.100.000,-   | 40,00%  |
| III | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |           |           |         |  | Rp 24.700.000,-  | Rp 18.910.501,-  | 76,56%  |
| 5   | Penyediaan jasa Surat Menyurat                                        | 70 lembar | 70 lembar | 100,00% |  | Rp 700.000,-     | Rp 700.000,-     | 100,00% |
| 6   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 24.000.000,-  | Rp 18.210.501,-  | 75,88%  |
| IV  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah |           |           |         |  | Rp 2.000.000,-   | Rp 1.400.000,-   | 70,00%  |
| 7   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% |  | Rp 2.000.000,-   | Rp 1.400.000,-   | 70,00%  |
| B   | Program Pengelolaan Pendidikan                                        |           |           |         |  | Rp 220.000.000,- | Rp 220.000.000,- | 100,00% |
| V   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                       |           |           |         |  | Rp 220.000.000,- | Rp 220.000.000,- | 100,00% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|     |                                                                       |          |          |         |                  |                  |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------------------|------------------|---------|
| 8   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                         | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 220.000.000,- | Rp 220.000.000,- | 100,00% |
|     | SMP Negeri 9 Pariaman                                                 |          |          |         | Rp 396.030.000,- | Rp 285.933.500,- | 72,20%  |
| A   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota                  |          |          |         | Rp 51.730.000,-  | Rp 8.960.000,-   | 17,32%  |
| I   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |          |          |         | Rp 16.800.000,-  | Rp 8.460.000,-   | 50,36%  |
| 1   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 16.800.000,-  | Rp 8.460.000,-   | 50,36%  |
| II  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |          |          |         | Rp 16.750.000,-  | -                | 0,00%   |
| 2   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | 12 bulan | 12 bulan | 0,00%   | Rp 11.450.000,-  | -                | 0,00%   |
| 3   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | 12 bulan | 12 bulan | 0,00%   | Rp 5.300.000,-   | -                | 0,00%   |
| III | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |          |          |         | Rp 8.000.000,-   | -                | 0,00%   |
| 4   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | 1 paket  | 0        | 0,00%   | Rp 8.000.000,-   | -                | 0,00%   |
| IV  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |          |          |         | Rp 3.500.000,-   | -                | 0,00%   |
| 5   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 12 bulan | 12 bulan | 0,00%   | Rp 3.500.000,-   | -                | 0,00%   |
| V   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah |          |          |         | Rp 6.680.000,-   | Rp 500.000,-     | 7,49%   |
| 6   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | Rp 6.680.000,-   | Rp 500.000,-     | 7,49%   |



|    |                                                 |          |          |         |  |                  |                  |        |
|----|-------------------------------------------------|----------|----------|---------|--|------------------|------------------|--------|
| B  | Program Pengelolaan Pendidikan                  |          |          |         |  | Rp 344.300.000,- | Rp 276.973.500,- | 80,45% |
| VI | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |          |          |         |  | Rp 344.300.000,- | Rp 276.973.500,- | 80,45% |
| 7  | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |  | Rp 344.300.000,- | Rp 276.973.500,- | 80,45% |

## B. KESEHATAN

Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp108.211.620.866,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 97.189.844.576,- (89,81%), dengan uraian berikut:

| Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Kebijakan | Target     | Realisasi  | Capaian Kinerja (%) | Alokasi Anggaran     | Realisasi Anggaran   | Realisasi (%) |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar  |           |            |            |                     | Rp 83.617.792.202,00 | Rp 75.852.431.343,00 | 90,71%        |
| Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                             |           |            |            |                     | Rp 83.617.792.202,00 | Rp 75.852.431.343    | 90,71%        |
| Dinas Kesehatan                                                  |           |            |            |                     | Rp 83.617.792.202    | Rp 75.852.431.343    | 90,71%        |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      |           |            |            |                     | Rp 59.861.684.163    | Rp 54.666.405.334    | 91,32%        |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |           |            |            |                     | Rp 15.702.750,00     | Rp 15.302.750,00     | 97,45%        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan            |           | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 100%                | Rp 15.702.750,00     | Rp 15.302.750        | 97,45%        |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|                                                                  |  |  |           |           |  |  |    |                |    |                |         |
|------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--|--|----|----------------|----|----------------|---------|
| Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                  |  |  |           |           |  |  |    |                |    |                |         |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |  |  |           |           |  |  | Rp | 58.877.228.163 | Rp | 53.895.400.336 | 91,54%  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |  | 620 Orang | 620 Orang |  |  |    | 100%           | Rp | 58.645.103.163 | 91,54%  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |  | 25 Orang  | 25 Orang  |  |  |    | 100%           | Rp | 232.125.000    | 91,93%  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |  |           |           |  |  | Rp | 367.500.000    | Rp | 304.690.134    | 82,91%  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  | 4 Jenis   | 4 Jenis   |  |  | Rp | 10.000.000     | Rp | 10.000.000     | 100,00% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  | 3 Unit    | 3 Unit    |  |  | Rp | 7.500.000      | Rp | 5.400.000      | 72,00%  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |  | 29 Jenis  | 29 Jenis  |  |  | Rp | 35.000.000     | Rp | 34.984.000     | 99,95%  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |  |  | 2 Jenis   | 2 Jenis   |  |  | Rp | 15.000.000     | Rp | 8.487.500      | 56,58%  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  | 12 Bulan  | 12 Bulan  |  |  | Rp | 300.000.000    | Rp | 245.818.634    | 81,94%  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |  |  |           |           |  |  | Rp | 251.439.200    | Rp | 193.006.314    | 76,76%  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  | 1 Tahun   | 1 Tahun   |  |  | Rp | 3.000.000      | Rp | 1.000.000      | 33,33%  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|                                                                                                                     |                                                                          |              |              |      |    |             |    |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----|-------------|----|-------------|---------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                          | 2 Gedung     | 2 Gedung     | 100% | Rp | 154.200.000 | Rp | 109.913.314 | 71,28%  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                          | 16 Jenis     | 16 Jenis     | 100% | Rp | 94.239.200  | Rp | 82.093.000  | 87,11%  |
|                                                                                                                     |                                                                          | 3 Orang      | 3 Orang      | 100% |    |             |    |             |         |
|                                                                                                                     |                                                                          | 1 Orang      | 1 Orang      | 100% |    |             |    |             |         |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                          |              |              |      | Rp | 341.139.050 | Rp | 249.330.800 | 73,09%  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                          | 25 Kendaraan | 25 Kendaraan | 100% | Rp | 311.989.050 | Rp | 225.830.800 | 72,38%  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                          | 25 Unit      | 25 Unit      | 100% | Rp | 19.150.000  | Rp | 13.500.000  | 70,50%  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                          | 1 Unit       | 1 Unit       | 100% | Rp | 10.000.000  | Rp | 10.000.000  | 100,00% |
| Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                          |                                                                          |              |              |      | Rp | 8.675.000   | Rp | 8.675.000   | 100,00% |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                              | Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | 1 Tahun      | 1 Tahun      | 100% | Rp | 8.675.000   | Rp | 8.675.000   | 100,00% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023**

|                                                                                             |                                                                                                                                            |            |            |            |    |                |    |                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----|----------------|----|----------------|--------|
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                 |                                                                                                                                            |            |            |            | Rp | 21.939.559.160 | Rp | 19.944.112.369 | 90,90% |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                            |            |            |            | Rp | 11.856.793.000 | Rp | 10.892.096.452 | 91,86% |
| Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                    | Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang. Kepalaangmerahan |            |            |            | Rp | 6.500.000.000  | Rp | 5.691.106.390  | 87,56% |
| Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                             | Perpres RI No.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah                                                                       | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Rp | 170.000.000    | Rp | 166.784.410    | 98,11% |
| Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                 | Perpres RI No.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah                                                                       | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | Rp | 2.062.850.000  | Rp | 1.984.399.436  | 96,20% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

|                                                                                      |                                                                                   |            |            |       |    |               |    |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|----|---------------|----|---------------|-----------|
| Pengadaan Obat, Vaksin                                                               | Perpres RI No.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah              | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 100%  | Rp | 2.098.319.000 | Rp | 2.027.781.335 | 9663,84 % |
| Pengadaan Bahan Habis Pakai                                                          | Perpres RI No.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah              | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 100%  | Rp | 1.025.624.000 | Rp | 1.022.024.881 | 99,65%    |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                   |            |            |       | Rp | 9.918.593.560 | Rp | 8.902.603.317 | 89,76%    |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                               | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 77.0% | Rp | 43.007.000    | Rp | -             | 0,00%     |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 37.5% | Rp | 20.633.500,-  | Rp | 11.796.000,-  | 57,17%    |
|                                                                                      |                                                                                   | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |       |    |               |    |               |           |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|                                                            |                                                                                                                                     |                             |                        |      |    |               |    |              |         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------|----|---------------|----|--------------|---------|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Permenkes No.4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar                                                     | 150 orang wanita usia subur | 150 orang wanita subur | 100% | Rp | 14.789.000,-  | Rp | 14.789.000,- | 100,00% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Permenkes Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan | 3 Kegiatan                  | 3 Kegiatan             | 100% | Rp | 38.917.600    | Rp | 36.937.600   | 94,91%  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Permenkes Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan | 0                           | 7 Puskesmas            | 0    | Rp | 17.058.500    | Rp | -            | 0,00%   |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Permenkes Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan                          | 7 Puskesmas                 | 7 Puskesmas            | 100% | Rp | 106.944.000,- | Rp | 104.514.300  | 97,73%  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|                                                                  | Minimal Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                         | 2 kasus/ rujukan                                                                            | 2 kasus/ rujukan     | 100% | Rp 14.694.250,- | Rp 1.850.000,-  | 12,59% |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------|-----------------|--------|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Permenkes Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan<br>• Permenkes 67 Tahun 2016<br>• Perpres 67 Tahun 2021<br>• DPA Dinkes 2023 | 2 kasus/ rujukan                                                                            | 2 kasus/ rujukan     | 100% | Rp 14.694.250,- | Rp 1.850.000,-  | 12,59% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis       | • Permenkes 67 Tahun 2016<br>• Perpres 67 Tahun 2021<br>• DPA Dinkes 2023                                                                                                                                        | Peningkatan kapasitas petugas dalam pemenuhan dan tatalaksana TBC pada 7 puskesmas dan 4 RS | 7 Puskesmas dan 4 RS | 100% | Rp 51.500.000,- | Rp 50.697.500,- | 98,44% |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | Promosi dan Sosialisasi penyakit TBC pada LS dan masyarakat                                 | 1 Kegiatan           | 100% |                 |                 |        |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|                                                                    |                                                                                       | Terbentuknya jejaring eksternal penanggulangan TBC | Klinik swasta, DPM, Organisasi Profesi Kesehatan | 100% |                  |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | MDGs                                                                                  | Petugas puskesmas dan RS                           | 7 Puskesmas dan 4 RS                             | 100% | Rp 29.024.000,-  | Rp 27.629.000,-  | 95,19% |
|                                                                    | Kepmenkes Nomor 23 tahun 2022 ttg Penanggulangan AIDS dan PIMS                        | Petugas puskesmas dan RS                           | 7 Puskesmas dan 4 RS                             | 100% |                  |                  |        |
|                                                                    | DPA Dinkes 2023                                                                       | WBP                                                | 1 Lapas                                          | 100% |                  |                  |        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Permenkes Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tekhnis Surveilans Gizi             |                                                    |                                                  |      | Rp 223.784.000,- | Rp 214.720.901,- | 95,95% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Permenkes RI Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas | 3 kegiatan                                         | 3 kegiatan                                       | 100% | Rp 12.724.000,-  | Rp 10.734.000,-  | 84,36% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|                                                |                                                                                                                                                 |               |               |      |    |               |    |               |        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|----|---------------|----|---------------|--------|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan     | Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyebaran Lingkungan                                                                   | 5 TPU dan TPP | 4 TPU dan TPP | 80%  | Rp | 150.000.000,- | Rp | 109.308.000,- | 72,87% |
| Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan        | Permenkes Nomor. 65 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                              | 3 Kegiatan    | 3 Kegiatan    | 100% | Rp | 78.799.000,-  | Rp | 78.666.000,-  | 99,83% |
| Pengelolaan Surveilans Kesehatan               | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan | 1 Tahun       | 1 Tahun       | 100% | Rp | 199.970.000,- | Rp | 93.970.000,-  | 46,99% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | DPA Dinkes 2023                                                                                                                                 | 1 Kegiatan    | 1 Kegiatan    | 100% | Rp | 9.373.000,-   | Rp | 7.273.000,-   | 77,60% |
| Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus             | PMA No. 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular                                                                               | 1 Tahun       | 1 Tahun       | 80%  | Rp | 7.655.500,-   | Rp | 5.257.750,-   | 68,68% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

|                                                                                                |                                                                                                                             |                                                             |        |    |                 |    |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|----|-----------------|--------|
| Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                         | • DPA Dinkes 2023                                                                                                           | 7 Puskesmas                                                 | 100%   | Rp | 540.959.760,-   | Rp | 375.694.800,-   | 69,45% |
| a. Kegiatan Fogging Fokus/ Pengasapan Kasus DBD                                                |                                                                                                                             | 4 Puskesmas                                                 | 100%   |    |                 |    |                 |        |
| b. Kegiatan pendampingan pembinaan teknis, penemuan penyakit menular dan filariasis kecacingan |                                                                                                                             | 7 puskesmas<br>4 RS<br>10 Desa/Kel<br>1 LAPAS<br>56 Sekolah | 100%   |    |                 |    |                 |        |
| c. Kegiatan Pembinaan Deteksi Dini PTM, Skrining Jiwa, Pembinaan UBM, KTR                      |                                                                                                                             | 7 Puskesmas                                                 | 100%   |    |                 |    |                 |        |
| Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                       | • Perpres RI No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan | 1 Tahun                                                     | 98,76% | Rp | 7.073.351.950,- | Rp | 6.970.517.500,- | 98,55% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

|                                                         |                                                                                                                                                                       |         |         |      |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------------|------------------|--------|
| Penyelenggaraan<br>Kabupaten/Kota Sehat                 | Keputusan<br>Menteri Dalam<br>Negeri Nomor<br>650-185 Tahun<br>2002 tentang<br>Pembentukan<br>Kelompok Kerja<br>Pembinaan<br>Pelaksanaan<br>Program<br>Kabupaten/Kota | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | Rp 43.650.000,-  | Rp 43.450.000,-  | 99,54% |
| Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                      | Permenkes<br>Nomor. 39 tahun<br>2016 tentang<br>Pedoman<br>Penyelenggaraan<br>Program<br>Indonesia Sehat<br>dengan<br>Pendekatan<br>Keluarga                          | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | Rp 13.385.000,-  | Rp 11.485.000,-  | 85,81% |
| Operasional Pelayanan<br>Fasilitas Kesehatan<br>Lainnya | PMK no. 19<br>Tahun 2016<br>tentang Sistem<br>Penanggulangan<br>gawat darurat<br>Terpadu                                                                              | 1 Tahun | 1 Tahun | 90%  | Rp 422.595.000,- | Rp 180.491.000,- | 42,71% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

|                                                                                                        |                                                                                                                                                 |         |         |      |                  |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------------|------------------|--------|
| Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | Rp 777.758.000,- | Rp 549.821.966,- | 70,69% |
| Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                          | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | Rp 28.020.500,-  | Rp 3.000.000,-   | 10,71% |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                         |                                                                                                                                                 |         |         |      | Rp 122.736.000,- | Rp 111.896.000,- | 91,17% |
| Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                 | DPA DINKES 2023                                                                                                                                 | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | Rp 122.736.000,- | Rp 111.896.000,- | 91,17% |
| Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                 |         |         |      | Rp 41.436.600,-  | Rp 37.516.600,-  | 90,54% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |               |      |    |               |    |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------|----|---------------|--------|
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenkes No. 14 tahun 2021</li> <li>• Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> </ul> | 30 Fasyankes  | 100% | Rp | 25.896.600,-  | Rp | 22.776.600,-  | 87,95% |
| Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ul>                                                                        | 1 Tahun       | 100% | Rp | 15.540.000,-  | Rp | 14.740.000,-  | 94,85% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                           |                                                                                                                                                                                             |               |      | Rp | 866.148.379,- | Rp | 396.257.600,- | 45,75% |
| Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                                                                                                             |               |      | Rp | 39.757.400,-  | Rp | 30.057.400,-  | 75,60% |
| Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU no. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>• Permenkes RI Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</li> </ul>           | 1.734 Tenakes | 100% | Rp | 21.480.400,-  | Rp | 16.920.400,-  | 78,77% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |               |      |    |               |    |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------|----|---------------|--------|
| Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU no.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>Permenkes RI Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</li> </ul> | 1.734 Tenakes | 100% | Rp | 18.277.000,-  | Rp | 13.137.000,-  | 71,88% |
| Perencanaan Kebutuhan dan Pendencygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                              |               |      | Rp | 199.878.200,- | Rp | 104.126.200,- | 52,09% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |      |                 |                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan BAKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional Kesehatan.</li><li>• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li></ul> | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | Rp 38.828.000,- | Rp 33.388.000,- | 85,99% |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |      |    |              |    |              |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----|--------------|----|--------------|--------|
| Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan BAKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional Kesehatan.</li><li>• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li></ul> | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | Rp | 14.322.000,- | Rp | 12.922.000,- | 90,22% |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----|--------------|----|--------------|--------|



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |             |             |      |    |               |    |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|----|---------------|----|---------------|--------|
| Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                          | • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas | 1 Tahun     | 1 Tahun     | 100% | Rp | 146.728.200,- | Rp | 57.816.200,-  | 39,40% |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                       |             |             |      | Rp | 626.512.779,- | Rp | 262.074.000,- | 41,83% |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | • Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan                                                                                                            | 8 Pelatihan | 4 Pelatihan | 50%  | Rp | 626.512.779,- | Rp | 262.074.000,- | 41,83% |
| Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                                                     |                                                                                                                                                                       |             |             |      | Rp | 359.186.000,- | Rp | 287.808.500,- | 80,13% |
| Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,                                              |                                                                                                                                                                       |             |             |      | Rp | 36.810.000,-  | Rp | 19.200.000,-  | 52,16% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |          |          |   |                  |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|------------------|------------------|--------|
| Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 80 Orang | 80 Orang |   |                  |                  |        |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                             | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/ Menkes/427/2015 tentang Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat | 1 Tahun  | 1 Tahun  | 0 | Rp 21.200.000,-  | Rp 19.200.000,-  | 90,57% |
| Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                      | Permenkes no 14 Tahun 2021                                                                                                        | 1 Tahun  | 1 Tahun  | 0 | Rp 15.610.000,-  | Rp -             | 0,00%  |
| Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                                                                                                                                   |          |          |   | Rp 103.702.000,- | Rp 102.491.500,- | 98,83% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |      |                  |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------------------|------------------|--------|
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | PerBPOM No.7 tahun 2022 tentang Petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2022 | 75 Orang               | 75 Orang              | 100% | Rp 103.702.000,- | Rp 102.491.500,- | 98,83% |
| Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |      | Rp 82.000.000,-  | Rp 49.300.000,-  | 60,12% |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan                                       | 100 depot dan pamsimas | 60 depot dan pamsimas | 60%  | Rp 82.000.000,-  | Rp 49.300.000,-  | 60,12% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |           |           |      |    |               |    |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----|---------------|----|---------------|--------|
| Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga           |                                                                                                                                                                                                           |           |           |      | Rp | 136.674.000,- | Rp | 116.817.000,- | 85,47% |
| Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | PerBPOM No.7 tahun 2022 tentang Petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2022 | 30 Sampel | 30 Sampel | 100% | Rp | 136.674.000,- | Rp | 116.817.000,- | 85,47% |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |           |           |      | Rp | 591.214.500,- | Rp | 557.847.540,- | 94,36% |
| Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                                                                                                                                                                                                           |           |           |      | Rp | 129.700.000,- | Rp | 124.185.500,- | 95,75% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |            |            |      |                  |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------------|------------------|--------|
| Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | PerBPOM No.7 tahun 2022 tentang Petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2022 | 180 Orang  | 180 Orang  | 100% | Rp 129.700.000,- | Rp 124.185.500,- | 95,75% |
|                                                                                      | Permenkes Nomor. 65 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                                        | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100% |                  |                  |        |
| Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota      |                                                                                                                                                                                                           |            |            |      | Rp 82.480.000,-  | Rp 74.520.000,-  | 90,35% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |      |                  |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------|
| Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                         | Permenkes Nomor. 65 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 4 Kegiatan                                                     | 4 Kegiatan                                                     | 100% | Rp 82.480.000,-  | Rp 74.520.000,-  | 90,35% |
| Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |      | Rp 379.034.500,- | Rp 359.142.040,- | 94,75% |
| Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Permenkes Nomor. 65 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 4 Kegiatan                                                     | 4 Kegiatan                                                     | 100% | Rp 248.200.000,- | Rp 248.108.040,- | 99,96% |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | 40 Orang Kader Jiwa di dua kecamatan pariaman tengah dan Utara | 40 Orang Kader Jiwa di dua kecamatan pariaman tengah dan Utara | 100% | Rp 64.834.500,-  | Rp 57.384.000,-  | 88,51% |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | 1 Kegiatan                                                     | 1 Kegiatan                                                     | 100% | Rp 66.000.000,-  | Rp 53.650.000,-  | 81,29% |



### C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palembang serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.182.028.946,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.953.584.912,- (81,46%), dengan uraian berikut:

| No | Program/kegiatan                                                                                                                                               | Kebijakan                                   | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Realisasi (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                              | 3                                           | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9             |
| I  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                                                                      |                                             |                               |           |                     | Rp 1.307.193.880,-    | Rp 1.185.317.675,-      | 90,68%        |
| 1  | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota                                            | UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air | 1,096 km                      | 0,801 km  | 100%                | Rp 540.005.000,-      | Rp 427.707.761,-        | 83,06%        |
| 2  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air | 19 km                         | 19,35 km  | 100%                | Rp 767.188.880,-      | Rp 757.609.914,-        | 99,02%        |
| II | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                                                           |                                             |                               |           |                     | Rp 5.148.118.850,-    | Rp 5.035.059.807,-      | 97,80%        |
| 1  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung                                                                                  | UU No 17 Tahun 2019 tentang                 | 7,702 km                      | 11,025 km | 100%                | Rp 5.148.118.850,-    | Rp 5.035.059.807,-      | 97,80%        |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

| No  | Program/kegiatan                                                                                                                                                | Kebijakan                                | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Realisasi (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                               | 3                                        | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9             |
|     | dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                       | Sumber Daya Air                          |                               |           |                     |                       |                         |               |
| III | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                   |                                          |                               |           |                     | Rp 24.057.321.631,-   | Rp 21.537.291.504,-     | 89,52%        |
|     | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                            | UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan        | 11,06 km                      | 10,58 km  | 96,94%              | Rp 24.057.321.631,-   | Rp 21.537.291.504,-     | 89,52%        |
| IV  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                                                                            |                                          |                               |           |                     | Rp 80.000.000,-       | Rp 17.858.650,-         | 22,32%        |
|     | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                                   | UU No.2 Tahun 2017 tentang Jakon         | 50 orang                      | -         | 0%                  | Rp 80.000.000,-       | Rp 17.858.650,-         | 22,32%        |
| V   | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                                                                                |                                          |                               |           |                     | Rp 4.431.744.600,-    | Rp 3.013.458.455,-      | 68,00%        |
|     | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | 22 dok                        | 22 dok    | 82,73%              | Rp 4.431.744.600,-    | Rp 3.013.458.455,-      | 68,00%        |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

| No | Program/kegiatan                                                                      | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Realisasi (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9             |
| VI | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |           |                     | Rp 200.000.000,-      | Rp 98.080.500,-         | 49,04%        |
|    | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>- PP no.16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>- PP No.15 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU no.6 Tahun 2017 tentang arsitek</li> </ul> | 1 Kawasan                     | 1 Kawasan | 100 %               | Rp 200.000.000,-      | Rp 98.080.500,-         | 49,04%        |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

| No   | Program/kegiatan                                                                                               | Kebijakan                                | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Realisasi (%) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                              | 3                                        | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9             |
| VII  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                         |                                          |                               |           |                     | 300.043.000           | 218.942.900             | 72,97         |
|      | Kegiatan Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota               | UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | 1 dok                         | -         | 66,67%              | Rp 375.500.000,-      | Rp 115.264.810,-        | 30,70%        |
| VIII | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                         |                                          | 69,13 %                       | 70,45%    | 101,91 %            | Rp. 8.984.991.000,-   | Rp. 3.909.620.444,-     | 43,51%        |
|      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            |                                          | 1.000 RT                      | 890 RT    | 89,00%              | Rp. 8.984.991.000,-   | Rp. 3.909.620.444,-     | 43,51%        |
| IX   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                           |                                          | 100%                          | 100%      | 100%                | Rp. 80.025.000,-      | Rp. 76.475.800,-        | 95,56%        |
|      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                          | 40 m                          | 40 m      | 100%                | Rp. 80.025.000,-      | Rp. 76.475.800,-        | 95,56%        |
| X    | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                               |                                          | 93,15%                        | 92,07%    | 98,84%              | Rp. 97.700.000,-      | Rp. 0                   | 0%            |



| No | Program/kegiatan                                                                         | Kebijakan | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Realisasi (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                        | 3         | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9             |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |           | 100%                          | 10%       | 10%                 | Rp. 97.700.000,-      | Rp. 0                   | 0%            |

#### D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.182.028.946,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.953.584.912,- (81,46%), dengan uraian berikut:

| No | Program/kegiatan                                                                                                    | Kebijakan                                   | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Realisasi (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                                                   | 3                                           | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9             |
| 1  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                           |                                             |                               |           |                     | Rp 1.307.193.880,-    | Rp 1.185.317.675,-      | 90,68%        |
| 1  | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air | 1,096 km                      | 0,801 km  | 100%                | Rp 540.005.000,-      | Rp 427.707.761,-        | 83,06%        |
| 2  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi Primer                                                         | UU No 17 Tahun 2019 tentang                 | 19 km                         | 19,35 km  | 100%                | Rp 767.188.880,-      | Rp 757.609.914,-        | 99,02%        |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

| No  | Program/kegiatan                                                                                                        | Kebijakan                                   | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Realisasi (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                                       | 3                                           | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9             |
|     | dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Sumber Daya Air                             |                               |           |                     |                       |                         |               |
| II  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                    |                                             |                               |           |                     | Rp 5.148.118.850,-    | Rp 5.035.059.807,-      | 97,80%        |
| 1   | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota | UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air | 7,702 km                      | 11,025 km | 100%                | Rp 5.148.118.850,-    | Rp 5.035.059.807,-      | 97,80%        |
| III | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                           |                                             |                               |           |                     | Rp 24.057.321.631,-   | Rp 21.537.291.504,-     | 89,52%        |
|     | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                    | UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan           | 11,06 km                      | 10,58 km  | 96,94%              | Rp 24.057.321.631,-   | Rp 21.537.291.504,-     | 89,52%        |
| IV  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                                    |                                             |                               |           |                     | Rp 80.000.000,-       | Rp 17.858.650,-         | 22,32%        |
|     | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                           | UU No.2 Tahun 2017 tentang Jakon            | 50 orang                      | -         | 0%                  | Rp 80.000.000,-       | Rp 17.858.650,-         | 22,32%        |
| V   | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                                        |                                             |                               |           |                     | Rp 4.431.744.600,-    | Rp 3.013.458.455,-      | 68,00%        |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

| No | Program/kegiatan                                                                                                                                               | Kebijakan                                                                                                                                      | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Realisasi (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                              | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9             |
|    | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                                                                                       | 22 dok                        | 22 dok    | 82,73%              | Rp 4.431.744.600,-    | Rp 3.013.458.455,-      | 68,00%        |
| VI | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                               |           |                     | Rp 200.000.000,-      | Rp 98.080.500,-         | 49,04%        |
|    | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota                                                                          | - UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<br>- PP no.16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 1 Kawasan                     | 1 Kawasan | 100 %               | Rp 200.000.000,-      | Rp 98.080.500,-         | 49,04%        |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

| No   | Program/kegiatan                                                                                | Kebijakan                                                                              | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Realisasi (%) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                               | 3                                                                                      | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9             |
|      |                                                                                                 | - PP No.15 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU no.6 Tahun 2017 tentang arsitek |                               |           |                     |                       |                         |               |
| VII  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                          |                                                                                        |                               |           |                     | 300.043.000           | 218.942.900             | 72,97         |
|      | Kegiatan Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                               | 1 dok                         | -         | 66,67%              | Rp 375.500.000,-      | Rp 115.264.810,-        | 30,70%        |
| VIII | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                          |                                                                                        | 69,13 %                       | 70,45%    | 101,91 %            | Rp. 8.984.991.000,-   | Rp. 3.909.620.444,-     | 43,51%        |
|      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota             |                                                                                        | 1.000 RT                      | 890 RT    | 89,00%              | Rp. 8.984.991.000,-   | Rp. 3.909.620.444,-     | 43,51%        |
| IX   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                            |                                                                                        | 100%                          | 100%      | 100%                | Rp. 80.025.000,-      | Rp. 76.475.800,-        | 95,56%        |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023**

| No | Program/kegiatan                                                                                               | Kebijakan | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Realisasi (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                                              | 3         | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9             |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |           | 40 m                          | 40 m      | 100%                | Rp. 80.025.000,-      | Rp. 76.475.800,-        | 95,56%        |
| X  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                               |           | 93,15%                        | 92,07%    | 98,84%              | Rp. 97.700.000,-      | Rp. 0                   | 0%            |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                       |           | 100%                          | 10%       | 10%                 | Rp. 97.700.000,-      | Rp. 0                   | 0%            |



#### E. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.818.194.175,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 16.101.688.524,- (95,74%), dengan uraian berikut:

| No                                                             | Program/Sub Kegiatan                                                                              | Kebijakan                        | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Alokasi Anggaran   | Realisasi Anggaran | Realisasi (%) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                 | 3                                | 4                             | 5         | 6                   | 7                  | 8                  | 9             |
| <b>Dinas Satpol PP &amp; Damkar</b>                            |                                                                                                   |                                  |                               |           |                     |                    |                    |               |
| <b>I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b> |                                                                                                   |                                  |                               |           |                     |                    |                    |               |
| 1                                                              | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun                       | 1 tahun   | 100%                | Rp 5.061.385.048,- | Rp 5.041.652.200,- | 99,61%        |
| 2                                                              | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun                       | 1 tahun   | 100%                | Rp 170.983.300,-   | Rp 165.842.009,-   | 96,99%        |
| 3                                                              | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun                       | 1 tahun   | 100%                | Rp 134.643.600,-   | Rp 76.959.636,-    | 57,16%        |
| 4                                                              | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun                       | 1 tahun   | 100%                | Rp 202.699.100,-   | Rp 155.946.100,-   | 76,93%        |
| <b>II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>  |                                                                                                   |                                  |                               |           |                     |                    |                    |               |
| 1                                                              | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun                       | 1 tahun   | 100%                | Rp 3.409.671.260,- | Rp 3.219.219.884,- | 94,41%        |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|                                            |                                                                                                                                              |                                  |           |           |      |                    |                    |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|--------|
| 2                                          | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                            | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun   | 1 tahun   | 100% | Rp 54.345.000,-    | Rp 34.370.000,-    | 63,24% |
| III                                        | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                    |                                  |           |           |      |                    |                    |        |
| 1                                          | Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun   | 1 tahun   | 100% | Rp 2.249.246.400,- | Rp 2.172.391.991,- | 96,58% |
| 2                                          | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                                               | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun   | 1 tahun   | 100% | Rp 5.000.000,-     | Rp 5.000.000,-     | 100%   |
| 3                                          | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                           | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 100%      | 100%      | 100% | Rp 6.450.000,-     | Rp -               | 0%     |
| <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b> |                                                                                                                                              |                                  |           |           |      |                    |                    | 94,69% |
| I                                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                 | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019  | 100%      | 100%      | 100% | Rp 3.394.095.467,- | Rp 3.242.234.340,- | 95,53% |
| a                                          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019  | 7 laporan | 7 laporan | 100% | Rp 3.500.000,-     | Rp 3.500.000,-     | 100%   |
| b                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019  | 1 tahun   | 1 tahun   | 100% | Rp 2.586.654.017,- | Rp 2.537.581.044,- | 98,10% |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                       |                                 |            |            |      |                    |                    |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------|--------|
| c  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 1 tahun    | 1 tahun    | 100% | Rp 278.150.000,-   | Rp 260.523.171,-   | 93,66% |
| d  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 1 unit     | 1 unit     | 100% | Rp 15.000.000,-    | Rp 14.985.000,-    | 99,90% |
| e  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 1 tahun    | 1 tahun    | 100% | Rp 200.540.000,-   | Rp 164.307.285,-   | 81,93% |
| f  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 5 jenis    | 5 jenis    | 100% | Rp 310.251.450,-   | Rp 261.337.840,-   | 84,23% |
| II | Program Penanggulangan Bencana                                        |                                 | 100%       | 100%       | 100% | Rp 2.129.675.000,- | Rp 1.988.072.364,- | 93,35% |
| a  | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                      |                                 | 50 orang   | 50 orang   | 100% | Rp 158.466.600,-   | Rp 157.453.300,-   | 99,36% |
| b  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana               |                                 | 930 orang  | 930 orang  | 100% | Rp 193.274.000,-   | Rp 152.032.320,-   | 78,66% |
| c  | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                    |                                 | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | Rp 1.724.454.400,- | Rp 1.625.777.244,- | 94,28% |
| d  | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                          |                                 | 1 dokume   | 1 dokumen  | 100% | Rp 53.480.000,-    | Rp 52.809.500,-    | 98,75% |



## F. SOSIAL

Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.293.041.771,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.896.126.460,- (90,75%), dengan uraian berikut:

| No | Program/kegiatan                                                                                                           | Kebijakan                                                           | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Persentase realisasi (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                             | 5         | 6                   | 7                     | 8                       | 9                        |
| I  | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                                |                                                                     |                               |           |                     | Rp. 484.107.000,-     | Rp. 471.894.694,-       | 97,48%                   |
| 1  | Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota                                                       | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 100%                          | 98,74%    | 98,74%              | Rp. 484.107.000,-     | Rp. 471.894.694,-       | 97,48%                   |
|    | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 100%                          | 97,48%    | 97,48%              | Rp. 448.107.000,-     | Rp. 439.794.694,-       | 98,15%                   |
|    | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                    | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 100%                          | 100%      | 100%                | Rp. 36.000.000,-      | Rp. 32.100.000,-        | 89,17%                   |
| II | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                |                                                                     |                               |           |                     | Rp. 181.314.950,-     | Rp. 110.988.500,-       | 61,21%                   |
| 1  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 545 org                       | 545 org   | 100%                | Rp. 96.234.950,-      | Rp. 82.348.500,-        | 85,57%                   |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|     |                                                                                             |                                                                     |        |        |       |                   |                   |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------|-------------------|--------|
| 2   | Rehabilitasi Sosial dasar PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 10 org | 10 org | 100%  | Rp. 85.080.000,-  | Rp. 28.640.000,-  | 33,66% |
| III | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                     |                                                                     |        |        |       |                   |                   |        |
| 1   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                 | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial |        |        |       | Rp. 388.242.000,- | Rp. 366.468.800,- | 94,39% |
|     | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                        | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 95%    | 95%    | 100%  | Rp. 99.999.000,-  | Rp. 91.859.000,-  | 91,86% |
|     | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                 | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 95%    | 95%    | 100%  | Rp. 46.163.000,-  | Rp. 35.413.800,-  | 76,71% |
|     | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                            | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 100%   | 100%   | 100%  | Rp. 242.080.000,- | Rp. 239.196.000,- | 98,81% |
| IV  | Program Penanganan Bencana                                                                  |                                                                     |        |        |       |                   |                   |        |
| 1   | Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan sosial kabupaten/kota                           | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 100 %  | 100 %  | 100 % | Rp. 118.011.700   | Rp. 75.094.746    | 63,63  |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|   |                                                                                 |                                                                                                                     |       |      |                  |                  |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|--------|
| 2 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial                                                 | 2 Kpg | 100% | Rp. 55.545.000,- | Rp. 39.840.000,- | 71,73% |
| V | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                        |                                                                                                                     |       |      | Rp. 46.495.000,- | Rp. 44.800.000,- | 96,35% |
| 1 | Pemeliharaan TMP Nasional Kabupaten/Kota                                        | Permensos Nomor 23 tahun 2014 tentang standar pengelolaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional | 100%  | 100% | Rp. 46.495.000,- | Rp. 44.800.000,- | 96,35% |
|   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                       | Permensos Nomor 23 tahun 2014 tentang standar pengelolaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional | 100%  | 100% | Rp. 29.995.000,- | Rp. 29.200.000,- | 97,35% |
|   | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                         | Permensos Nomor 23 tahun 2014 tentang standar pengelolaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional | 100%  | 100% | Rp. 16.500.000,- | Rp. 15.600.000,- | 94,55% |



### **BAB III**

## **HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

### **A. HASIL EPPD**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 bahwa Kota Pariaman memperoleh skor 3,2982 dengan Status Sedang serta peringkat 26 (dua puluh enam) tingkat Kota se Indonesia secara nasional. Hasil evaluasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dengan skor 2,53 status Rendah.

### **B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Pariaman bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Pariaman. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pariaman, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.



Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Pariaman tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.a atas Laporan Keuangan Kota Pariaman yang menjelaskan bahwa saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp 671.495.513,47 tersebut diantaranya terdapat sisa DAK sebesar Rp 469.655.289,47 yang seharusnya saldo DAK sebesar Rp 3.919.224.012,40. Selisih DAK sebesar Rp 3.449.568.722,93 telah digunakan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk membiayai kegiatan-kegiatan lain yang tidak tersedia dananya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



## **BAB IV**

### **REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Penerimaan Pemerintah Daerah adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu yang menyangkut seluruh penerimaan yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Penerimaan pemerintah akan memberikan pandangan yang sangat membantu tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang berbeda yang mampu mengontrol pertumbuhan anggaran pemerintah dan konsekuensinya menghalangi tingkat defisit keuangan daerah. Penerimaan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah, selain jumlah penduduk juga mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah.

Selain penerimaan, seperti lazimnya sebuah organisasi, pemerintah melakukan banyak pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi untuk membiayai kegiatan perekonomian, seperti menggerakkan dan merancang kegiatan ekonomi yang masyarakatnya atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Berdasarkan kinerja dalam struktur anggaran daerah pengeluaran daerah dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang konsumtif sebab pengeluaran ini manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan daerah, sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif karena pengeluaran ini digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang dapat menambah kekayaan daerah.

#### **A. PENERIMAAN DAERAH**

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pada tahun anggaran 2023, target pendapatan Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp656.742.616.421,00 dengan realisasi sebesar Rp625.829.083.470,04 atau sebesar 95,29%. Realisasi Pendapatan TA 2023 meningkat sebesar Rp18.990.395.524,44 atau 3,13% dari realisasi pendapatan TA 2022 sebesar Rp606.838.687.945,60. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan TA 2023 dan 2022 adalah:



**Tabel 4.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan**

| Uraian                                                                    | 2023                            |                           | %             | 2022                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                           | Anggaran setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)            |               | Realisasi (Rp)            |
| 1                                                                         | 2                               | 3                         | 4             | 5                         |
| <b>PENDAPATAN</b>                                                         | <b>656.742.616.421,00</b>       | <b>625.829.083.470,04</b> | <b>95,29</b>  | <b>606.838.687.945,60</b> |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                             | <b>56.734.994.431,00</b>        | <b>38.861.600.702,04</b>  | <b>68,50</b>  | <b>36.040.355.778,60</b>  |
| Pendapatan Pajak Daerah                                                   | 12.825.000.000,00               | 14.323.956.113,00         | 111,69        | 11.833.954.381,00         |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                               | 15.482.768.976,00               | 3.115.174.963,00          | 20,12         | 8.436.954.597,00          |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan              | 9.986.510.155,00                | 10.042.663.440,00         | 100,56        | 8.984.132.635,00          |
| Lain-lain PAD yang sah                                                    | 18.440.715.300,00               | 11.379.806.186,04         | 61,71         | 6.785.314.165,60          |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>588.990.496.392,00</b>       | <b>580.803.758.528,00</b> | <b>98,61</b>  | <b>565.410.756.553,00</b> |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>                       | <b>505.090.779.000,00</b>       | <b>505.788.526.492,00</b> | <b>100,14</b> | <b>481.621.110.774,00</b> |
| Dana Bagi Hasil Pajak                                                     | 5.223.962.000,00                | 6.516.066.396,00          | 124,73        | 11.095.877.342,00         |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                                          | 7.002.002.000,00                | 7.422.153.000,00          | 106,00        | 4.458.317.773,00          |
| Dana Alokasi Umum                                                         | 397.706.838.000,00              | 400.085.686.160,00        | 100,60        | 381.441.923.158,00        |
| Dana Alokasi Khusus                                                       | 95.157.977.000,00               | 91.764.620.936,00         | 96,43         | 84.624.992.501,00         |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>                                | <b>6.012.923.000,00</b>         | <b>6.012.923.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>8.914.775.000,00</b>   |
| Dana Insentif Daerah (DID)                                                | 6.012.923.000,00                | 6.012.923.000,00          | 100,00        | 8.914.775.000,00          |
| <b>Dana Desa</b>                                                          | <b>41.372.835.000,00</b>        | <b>41.372.835.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>39.543.276.000,00</b>  |
| <b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>                                 | <b>36.513.959.392,00</b>        | <b>27.629.474.036,00</b>  | <b>75,67</b>  | <b>35.331.594.779,00</b>  |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah                                        | 35.873.959.392,00               | 26.989.474.036,00         | 75,23         | 35.331.594.779,00         |
| Bantuan Keuangan                                                          | 640.000.000,00                  | 640.000.000,00            | 100,00        | -                         |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>11.017.125.598,00</b>        | <b>6.163.724.240,00</b>   | <b>55,95</b>  | <b>5.387.575.614,00</b>   |
| Pendapatan Hibah                                                          | 6.000.000.000,00                | 1.272.000.000,00          | 21,20         | 1.479.000.000,00          |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 5.017.125.598                   | 4.891.724.240,00          | 97,50         | 3.908.575.614,00          |

Penerimaan pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp24.162.236.933,00 dan realisasinya sebesar Rp718.418.400,47 sebesar 2,97%. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2023 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai berikut:



Tabel 4.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

| Uraian                                | Nilai (Rp)            |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                     |
| ➤ Kas Umum Daerah Kota Pariaman       | 671.495.513,47        |
| ➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Naras     | 2.800,00              |
| ➤ Kas di Bendahara Penerimaan - Tunai | 21.047.848,00         |
| ➤ Kas di Bendahara BOS                | 25.872.239,00         |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>718.418.400,47</b> |

**B. PENGELUARAN DAERAH**

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

TA 2023 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Hibah
  - d. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Tanah
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Gedung dan Bangunan
  - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
  - e. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tak Terduga
4. Belanja Transfer
  - a. Transfer Bagi hasil Pendapatan
  - b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp Rp619.164.014.291,00 dan Rp606.416.280.478,57. Realisasi Belanja TA 2023 meningkat sebesar Rp12.747.733.812,25 atau 2,10% dari Belanja TA 2022. Rincian Belanja adalah:

Tabel 4.3 Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

| No.           | Jenis Belanja Daerah  | Anggaran Tahun 2023 (Rp)  | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | %            | Realisasi Tahun 2022 (Rp) |
|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | 2                     | 3                         | 4                         | 5            | 6                         |
| 1             | Belanja Operasi       | 518.089.467.654,00        | 467.272.136.266,00        | 90,19        | 458.230.156.899,00        |
| 2             | Belanja Modal         | 72.924.374.789,00         | 63.799.160.485,00         | 87,49        | 61.316.158.584,75         |
| 3             | Belanja Tidak Terduga | 500.000.000,00            | -                         | -            | -                         |
| 4             | Belanja Transfer      | 89.391.010.911,00         | 88.092.717.540,00         | 98,55        | 86.869.964.995,00         |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>680.904.853.354,00</b> | <b>619.164.014.291,00</b> | <b>90,93</b> | <b>606.416.280.478,75</b> |



Dalam hal ini, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 4.3 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran TA 2023**

| No            | Uraian                 | Penerimaan                | Pengeluaran               |
|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.            | Pendapatan             | 625.829.083.470,04        |                           |
| 2.            | Belanja                |                           | 619.164.014.291,00        |
| 3.            | Penerimaan Pembiayaan  | 718.418.400,47            |                           |
| 4.            | Pengeluaran Pembiayaan |                           | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>626.547.501.870,51</b> | <b>619.164.014.291,00</b> |

Dapat diinformasikan didalam SiLPA akhir TA 2023 (per 31 Desember 2023) sebesar Rp7.383.487.579,51 mengalami peningkatan sebesar Rp6.665.069.179,22 atau 927,74% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp718.418.400,29. Rincian SiLPA Tahun 2023 adalah:

**Tabel 4.4 Rincian SiLPA Tahun 2023**

| Keterangan                      | Nilai (Rp)              |
|---------------------------------|-------------------------|
| ➤ Kas Umum Daerah Kota Pariaman | 5.184.423.125,13        |
| ➤ Kas di BLUD                   | 1.163.925.554,00        |
| ➤ Kas di Bendahara BOS          | 122.385,00              |
| ➤ Kas Dana Kapitasi pada FKTP   | 42.669.245,38           |
| ➤ Kas Lainnya                   | 992.347.270,00          |
| <b>JUMLAH</b>                   | <b>7.383.487.579,51</b> |



## **BAB V**

### **INOVASI DAERAH**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 386 ayat (2) menyatakan bahwa Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 388 ayat (7), (9), (10) dan (11) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri dan Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pasal 4 menyatakan bahwa Inovasi daerah berbentuk :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Kota Pariaman berhasil meraih prestasi masuk 10 besar nasional Kota Terinovatif se-Indonesia pada *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Pariaman menginput sebanyak 108 inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri dengan skor indeks 65,31 (kategori Sangat Inovatif). Rinciannya sebagai berikut :



**Tabel 5.1 Inovasi Daerah Tahun 2023**

| No. | Judul Inovasi                                                 | Bentuk Inovasi                          | OPD                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ESDM Versi 2 (Elektronik Sumber Daya Manusia Versi 2)         | Inovasi pelayanan publik                | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Kota Palembang) |
| 2   | K4 (Klinik Kinerja Kepegawaian Kita)                          | Inovasi pelayanan publik                | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Kota Palembang) |
| 3   | Sistem Informasi Siaga Bencana                                | Inovasi pelayanan publik                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kota Palembang)                      |
| 4   | SIGAB                                                         | Inovasi pelayanan publik                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kota Palembang)                      |
| 5   | Bukpiti LaKu                                                  | Inovasi pelayanan publik                | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD Kota Palembang)        |
| 6   | Si-1L41 Online                                                | Inovasi pelayanan publik                | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD Kota Palembang)        |
| 7   | IPAR (Income Pariaman)                                        | Inovasi pelayanan publik                | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD Kota Palembang)        |
| 8   | KLINIK HUKUM                                                  | Inovasi pelayanan publik                | Bagian Hukum Sekretariat Daerah                                                |
| 9   | LAKEK Online Plus (Laporan Koordinasi Ekonomi Online Plus)    | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | BAPPEDA Kota Palembang                                                         |
| 10  | SINKRONISASI DATA AKSI PANGAN DAN GIZI PLUS (SIDAK PAGI PLUS) | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | BAPPEDA Kota Palembang                                                         |
| 11  | E-SAKOPA TERINTEGRASI                                         | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | BAPPEDA Kota Palembang                                                         |
| 12  | PIAMAN UNGGUL PRODUKTIF                                       | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | BAPPEDA Kota Palembang                                                         |
| 13  | DUKCAPIL DIGI MOBILE TERINTEGRASI PLUS                        | Inovasi pelayanan publik                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Palembang)           |
| 14  | DUTA DUKCAPIL GENIUS                                          | Inovasi pelayanan publik                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Palembang)           |
| 15  | BASENDOK KETEK (BADAN SEHAT DOKUMEN KEPENDUDUKAN TABUEK)      | Inovasi pelayanan publik                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Palembang)           |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                                                                        |                          |                                                                      |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 16 | AIDL DIGI (AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DILAYANI DI KEGIATAN INSTANSI)                                      | Inovasi pelayanan publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Pariaman)  | Sipil |
| 17 | JUMPARIKES GADGET CERIA (JUM'AT PAGI PERIKSA KESEHATAN GERAKAN DETEKSI DINI GOALKAN EDUKASI TERPADU CERIA)             | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan (Dinas Kesehatan Kota Pariaman) |       |
| 18 | PERGI DE'TURING CERIA (PEMERIKSAAN GIGI DENGAN KARTU MONITORING CEGAH CARIES ANAK)                                     | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan (Dinas Kesehatan Kota Pariaman) |       |
| 19 | KORBAN VIRAL (KESEHATAN EMOSIONAL REMAJA BESERTA LANSIA INTERVENSIKAN RESIKO LANJUT)                                   | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan (Dinas Kesehatan Kota Pariaman) |       |
| 20 | CABE KERITING CERIA (CEGAH DAN ATASI BERSAMA KELUARGA ANTISIPASI STUNTING CERIA)                                       | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan (Dinas Kesehatan Kota Pariaman) |       |
| 21 | POSTING BOS (PENDAMPINGAN ORANG TUA ASUH ATASI STUNTING BERSAMA ORANG SEKITAR)                                         | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan (Dinas Kesehatan Kota Pariaman) |       |
| 22 | PANDU ESTRADISI ( PELAYANAN TERPADU KESEHATAN TRADISIONAL TERINTEGRASI )                                               | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kurai Taji (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)             |       |
| 23 | BISIK MANJA ( BINCANG-BINCANG SEPUTAR INFORMASI KESEHATAN MELALUI PELAYANAN JARAK JAUH) BERSAMA PODCAST CILOTEH SEHATI | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kurai Taji (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)             |       |
| 24 | SEBATIK PEKAN SARAN (SEKOLAH BEBAS JENTIK DENGAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK)                                          | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kurai Taji (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)             |       |
| 25 | FAGI PUSPA ( FORMULIR ASUHAN GIZI DIGITAL PUSKESMAS PARIAMAN)                                                          | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Pauh Pariaman (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)          |       |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                                                           |                                         |                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26 | LISAN PAPA BERLI (LAYANAN KLINIK SANITASI PUSKESMAS PARIAMAN BERBASIS ONLINE )                            | Inovasi pelayanan publik                | UPT Puskesmas Pauh Pariaman (Dinas Kesehatan Kota Pariaman) |
| 27 | CETAR PENTING (CEPAT TANGGAP RESPONSIF Pencegahan Stunting)                                               | Inovasi pelayanan publik                | UPT Puskesmas Air Santok (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)    |
| 28 | SAHABAT PKPR (SAHABAT PROGRAM KESEHATAN PEDULI REMAJA)                                                    | Inovasi pelayanan publik                | UPT Puskesmas Air Santok (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)    |
| 29 | PANTASTIS (PANTAU KEMBALI DAN ATASI PASIEN TUBERCULOSIS)                                                  | Inovasi pelayanan publik                | UPT Puskesmas Air Santok (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)    |
| 30 | BIKA MASAK (BULETIN KESEHATAN PUSKESMAS SIKAPAK)                                                          | Inovasi pelayanan publik                | UPT Puskesmas Sikapak (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)       |
| 31 | PESAN SI EMAM (PELAYANAN SANITASI ONLINE PUSKESMAS SIKAPAK)                                               | Inovasi pelayanan publik                | UPT Puskesmas Sikapak (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)       |
| 32 | SIKUMBANG BATU (SISTEM INFORMASI KOHORT PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BAYI DAN BALITA PUSKESMAS SIKAPAK)   | Inovasi pelayanan publik                | UPT Puskesmas Sikapak (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)       |
| 33 | NARAS KU BERSINAR OK (PENANGANAN DENGAN RASA SIMPATIK UNTUK KAMPUNG BERSIH DARI NARKOBA)                  | Inovasi pelayanan publik                | UPT Puskesmas Naras (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)         |
| 34 | PESONA SEHATI (PELAYANAN SATU PINTU TERINTEGRASI BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS DAN MENURUNKAN KEMATIAN ODHA) | Inovasi pelayanan publik                | UPT Puskesmas Naras (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)         |
| 35 | JAHE CINTA                                                                                                | Inovasi pelayanan publik                | UPT Puskesmas Marunggi (Dinas Kesehatan Kota Pariaman)      |
| 36 | UDA SAKO PIAMAN (Satu Data Desa/Kelurahan Kota Pariaman )                                                 | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman) |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                                     |                                                                                         |                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 37 | Klinik SIPADEH (Klinik Sistem Informasi Administrasi Persuratan Desa dan Kelurahan) | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)                |
| 38 | SIKNA (Sistem Informasi Kinerja Non ASN)                                            | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)                |
| 39 | Podcast Gandorlah Diskominfo Kota Pariaman                                          | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)                |
| 40 | E-KLIPING (Kliping Elektronik)                                                      | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)                |
| 41 | PROMOTION WARIOR                                                                    | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman)                  |
| 42 | SILADA PH (Sistem Layanan Data Perhotelan)                                          | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman)                  |
| 43 | Piaman Barayo                                                                       | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman)                  |
| 44 | PCE PLUS                                                                            | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman)                  |
| 45 | IRIS (Irigasi pariwiSata)                                                           | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman) |
| 46 | SIRIDA (Sistem Informasi iRigasi dan DrAinase)                                      | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman) |
| 47 | SIPENJALU (Sistem Informasi PENERANGAN JALAN Umum)                                  | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman) |
| 48 | SIP_PULEN (Sistem Informasi Pelayanan Pekerjaan Umum secara OnLEN)                  | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman) |
| 49 | SIRAFIKA (Sistem Informasi Realisasi Fisik dan Keuangan)                            | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman) |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | KERJA GENIUS (pembukaan bERSama Jalan bAru denGan gENIUS)                              | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman)                        |
| 51 | LADU MANTAP (LAYanan terpaDU perMasalahan TAnah Pariaman)                              | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman)                        |
| 52 | Kapas (Ketahanan Pangan Berkualitas)                                                   | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman)                                       |
| 53 | Rusa (Ruang Desa)                                                                      | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman)                                       |
| 54 | Garinda (Jaga Inventaris Desa)                                                         | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman)                                       |
| 55 | C-KTP (CEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN)                                             | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB KotaPariaman)       |
| 56 | SINIMIL SANTIANG (Siap Nikah Hamil, Segera Cegah Stunting)                             | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB Kota Pariaman)      |
| 57 | SI KEKE LANGSING (Sinergi Kampung KB Lancarkan Penurunan Stunting)                     | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB Kota Pariaman)      |
| 58 | E - SARTIKA (ELEKTRONIK - SISTEM INFORMASI ADUAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, IBU DAN ANAK) | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB Kota Pariaman)      |
| 59 | SIGAP (SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI ADMINISTRASI PERIZINAN)                           | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 60 | LAPAU BOSS (LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BISA OSS)                                       | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 61 | KOMITMEN (KOORDINASI, MONITORING, MANAJEMEN EVALUASI PERIZINAN)                        | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 62 | SIDAK (SISTEM INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN)                                          | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|    |                                                                                 |    |                                                                                         |                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 | PLAKAT (PELAYANAN AK1 TEMPAT)                                                   | DI | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 64 | SEGAR (SYSTEM ELECTRONIC GOVERNMENT ARCHIVE)                                    |    | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 65 | SIPIPA (SISTEM INFORMASI POTENSI INVESTASI KOTA PARIAMAN)                       |    | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 66 | GERCEP (GERAKAN CEPAT INVESTASI)                                                |    | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 67 | KLIK HI (KLINIK KONSULTASI HUBUNGAN INDUSTRIAL)                                 |    | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 68 | SAGA SAJA GENIUS (Satu Keluarga Satu Sarjana Generasi Intelektual dan Religius) |    | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Kota Pariaman)                                  |
| 69 | GHOSTING PAK DE KUL (Gerakan Sosialisasi Pentingnya PAUD ke Desa/Kelurahan)     |    | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Kota Pariaman)                                  |
| 70 | SEKOLAH DIBALIK JERUJI                                                          |    | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Kota Pariaman)                                  |
| 71 | KAPA PINCALANG (KARTU PARIAMAN PINTAR CAIR LANGSUNG)                            |    | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Kota Pariaman)                                  |
| 72 | Pantau Kilat Arus Lalin Pariaman ( Pak ALPar)                                   |    | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perhubungan (Dishub Kota Pariaman)                                                          |
| 73 | APIK PKB- Antrean Pendaftaran elektronik PKB                                    |    | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perhubungan (Dishub Kota Pariaman)                                                          |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|    |                                                                     |                                                                                         |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | SILAD PENGHUB - Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian Dishub      | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perhubungan (Dishub Kota Palembang)                                     |
| 75 | PENGKEPAL - Penanggulangan Kerusakan Prasarana Lalin (PengKepal)    | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perhubungan (Dishub Kota Palembang)                                     |
| 76 | BASSA SEGRATER - Bus Antar Siswa Sampai Sekolah Gratis Terintegrasi | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perhubungan (Dishub Kota Palembang)                                     |
| 77 | SI PELANTAS - Siswa Pelopor Keselamatan Lalu Lintas                 | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perhubungan (Dishub Kota Palembang)                                     |
| 78 | PANDA KA PULAU - Portal Analisa Data Kapal dan Penumpang Pulau      | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perhubungan (Dishub Kota Palembang)                                     |
| 79 | Sapusako (satu produk unggulan satu sentra satu koperasi)           | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM (Disperindagkop UKM Kota Palembang) |
| 80 | Korsi Berad (Koperasi Berantas Rentenir dan Lintah Darat)           | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM (Disperindagkop UKM Kota Palembang) |
| 81 | KaPe (Kartu Pemeliharaan)                                           | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Palembang (DP3 Kota Palembang)     |
| 82 | PoW Dinas (Portal Web Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan)        | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Palembang (DP3 Kota Palembang)     |
| 83 | SIPERILAUT (Sistem Informasi Perikanan dan Kelautan)                | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Palembang (DP3 Kota Palembang)     |
| 84 | ENAKDAWAN (Elektronik Peternakan dan Kesehatan Hewan)               | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Palembang (DP3 Kota Palembang)     |
| 85 | McBPPP (Media Center UPT BPPP)                                      | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Palembang (DP3 Kota Palembang)     |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palembang Tahun 2023**

|    |                                                                         |                                                                                         |                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86 | KITANI (Klinik Tani)                                                    | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Palembang (DP3 Kota Palembang)                  |
| 87 | SKOP (Sterilisasi Kucing Optimal)                                       | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Palembang (DP3 Kota Palembang)                  |
| 88 | GIAT BANK SAMPAH SABIJU LIBER (Sampah Bisa Jadi Uang Lingkungan Bersih) | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkimh Kota Palembang) |
| 89 | KLINIK DOKLING (KLINIK DOKUMEN LINGKUNGAN)                              | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkimh Kota Palembang) |
| 90 | Pojok Adiwiyata                                                         | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkimh Kota Palembang) |
| 91 | SILARIS LABLING (Registrasi Layanan Praktis Laboratorium Lingkungan)    | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkimh Kota Palembang) |
| 92 | TILANG KTP (Kartu Tanda Penduduk)                                       | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Dinas PolPP Damkar Kota Palembang) |
| 93 | Damkar X PLN                                                            | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Dinas PolPP Damkar Kota Palembang) |
| 94 | Layanan Pengaduan Via Whatsapp                                          | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Dinas PolPP Damkar Kota Palembang) |
| 95 | SATPOLJAR (Satpol PP Pelajar)                                           | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Dinas PolPP Damkar Kota Palembang) |
| 96 | SICENDOL PLUS (SISTEM INFORMASI CETAK DATA DTKS ONLINE PLUS)            | Inovasi pelayanan publik                                                                | Dinas Sosial Kota Palembang (Dinas Sosial Kota Palembang)                                  |
| 97 | Bimbingan Motivasi Berprestasi Bagi Siswa Miskin (BIMOSIGAKIN)          | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Sosial Kota Palembang (Dinas Sosial Kota Palembang)                                  |
| 98 | RING TINJU (Monitoring Tindak Lanjut)                                   | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Inspektorat Kota Palembang (Inspektorat Kota Palembang)                                    |
| 99 | KUPAS DURIAN (KONSULTASI, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SARAN).             | Inovasi pelayanan publik                                                                | Inspektorat Kota Palembang (Inspektorat Kota Palembang)                                    |



**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2023**

|     |                                                                     |                                                                                         |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 100 | LANCAR BESTIE (LAYANAN CEPAT REKOMENDASI BEBAS TEMUAN KEUANGAN)     | Inovasi pelayanan publik                                                                | Inspektorat Kota Pariaman (Inspektorat Kota Pariaman)   |
| 101 | PARLEMEN MENYAPA                                                    | Inovasi pelayanan publik                                                                | Sekretariat DPRD Kota Pariaman                          |
| 102 | RUANG ILMU                                                          | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Sekretariat DPRD Kota Pariaman                          |
| 103 | ADAT ETNIK (Administrasi Rapat Elektronik)                          | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Kantor Kesbangpol (Kantorkesbangpol Kota Pariaman)      |
| 104 | SONAR GTS (SOSIALISASI ANTI NARKOBA GOES TO SCHOOL)                 | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Kantor Kesbangpol (Kantorkesbangpol Kota Pariaman)      |
| 105 | MAMI GAMIS (Mari Minimalkan Keluarga Miskin)                        | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah                                                 | Kecamatan Pariaman Selatan (Kecamatan Pariaman Selatan) |
| 106 | PERKAPOSDA PENTING (Peran Kader Posyandu dalam Pencegahan Stunting) | Inovasi pelayanan publik                                                                | Kecamatan Pariaman Selatan (Kecamatan Pariaman Selatan) |
| 107 | Desaku Satu Rumah Satu Data (DESARUSADA)                            | Inovasi pelayanan publik                                                                | Kecamatan Pariaman Timur (Kecamatan Pariaman Timur)     |
| 108 | Laporan Rekapitan Musrenbang Online (Lapormas Boi)                  | Inovasi pelayanan publik                                                                | Kecamatan Pariaman Utara (Kecamatan Pariaman Utara)     |



## BAB VI PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) berisikan antara lain : capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD, Opini atas Laporan Keuangan Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta Inovasi Daerah.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan Otonomi Daerah. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja makro dimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman mengalami sedikit peningkatan sebesar 79,76 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 79,31. Angka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,20 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,13 persen. Angka pengangguran mengalami peningkatan dari 5,19 persen menjadi 5,68 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman mengalami percepatan dengan tumbuh sebesar 4,79 persen. Sementara Pendapatan per kapita Kota Pariaman meningkat mencapai 66,20 persen. Akan tetapi, ketimpangan pendapatan Kota Pariaman tergolong ketimpangan rendah dengan nilai tercatat 0,289.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, merupakan upaya dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berlandaskan kepada visi Kota Pariaman yaitu "*Pariaman Kota Tujuan Wisata Budaya yang Islami*" yang dijabarkan ke dalam misi Pembangunan Daerah. Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman diperlukan sebagai jembatan yang menghubungkan antara Visi dan Misi dengan strategi yang ditetapkan. Strategi Pemerintahan Kota Pariaman merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan maupun sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Program tersebut merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 bahwa Kota Pariaman memperoleh skor 3,2982 dengan Status Sedang serta peringkat 26 (dua puluh enam) tingkat Kota se Indonesia secara nasional. Sedangkan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman terhadap Laporan Keuangan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan penyajian "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Dalam menentukan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan di Kota Pariaman, perlu ditinjau sumber-sumber penerimaan daerah yang menjadi kriteria penting dalam mengalokasikan belanja, menentukan strategi dan prioritas anggaran. Pada Tahun 2023 target dari pendapatan Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp656.742.616.421,00 dengan realisasi sebesar Rp625.829.083.470,04 atau sebesar 95,29%. Untuk belanja



daerah pada APBD Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 680.904.853.354,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 619.164.014.291,00 atau sebesar 90,93%.

Kota Pariaman berhasil meraih prestasi masuk 10 besar nasional Kota Terinovatif se-Indonesia pada *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Pariaman menginput sebanyak 108 inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri dengan skor indeks 65,31 (kategori Sangat Inovatif).

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan diharapkan informasi ini dapat menjadi masukan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.